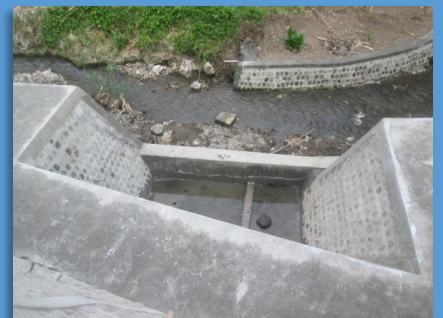


RENCANA STRATEGIS TAHUN 2016-2021

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BLITAR

**Peraturan Walikota Blitar No. 31 Tahun 2017
Tentang Perubahan Peraturan Walikota Blitar No. 81 Tahun 2016
Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021
Di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar**



KATA PENGANTAR

Dalam upaya mengembangkan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan yang mengindahkan prinsip-prinsip Good Governance di Kota Blitar khususnya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar, disusunlah suatu perencanaan yang bersifat strategis atau disebut sebagai Renstra sebagai langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja dalam sistem akuntabilitas.

Perencanaan strategis disusun dengan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu satu sampai dengan lima tahun (Tahun 2016 – 2021), dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan strategis baik lingkungan internal maupun lingkungan eksternal yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar.

Perlu disadari bahwa penyusunan Renstra Tahun 2016 – 2021 tidak menutup kemungkinan adanya penyempurnaan, oleh karena itu setiap saran, kritik maupun masukan yang bersifat membangun dari berbagai pihak sangat diharapkan.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah turut membantu kelancaran penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar ini.

Blitar, 05 Juli 2017

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Blitar

Drs. HERMANSYAH PERMADI, M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 19660423 199203 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 LANDASAN HUKUM	1
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN	3
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN	3
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	6
2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI	6
2.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH.....	24
2.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	29
2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN	34
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	35
3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	35
3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH	36
3.3 TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROPINSI/KOTA	37
3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS	43
3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS	45
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN ..	47
4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH	47
4.2. STRATEGI DAN KEBIJAKAN	53
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF	56
BAB VI INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD 	85

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	: Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kelamin	24
Tabel 2.2	: Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan	25
Tabel 2.3	: Komposisi Pegawai Menurut Pangkat / Golongan Ruang	25
Tabel 2.4	: Pegawai Yang Mengikuti Diklat Struktural	26
Tabel 2.5	: Pegawai Yang Mengikuti Diklat Teknis Fungsional	26
Tabel 2.6	: Barang Tidak Bergerak	27
Tabel 2.7	: Alat-Alat Berat / Bermesin	27
Tabel 2.8	: Alat-Alat Bengkel Tak Bermesin	28
Tabel 2.9	: Peralatan Kantor / Mebeler	28
Tabel 2.10	: Kriteria dan Kondisi Jalan	29
Tabel 2.11	: Matrik Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	31
Tabel 2.12	: Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	32
Tabel 4.1.1	: Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan dan Penataan Ruang Tahun 2016	49
Tabel 4.1.2	: Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan dan Penataan Ruang Tahun 2017-2021	51
Tabel 4.2	: Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	55
Tabel 5.1.1	: Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2016	57
Tabel 5.1.2	: Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2017	64
Tabel 5.1.3	: Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2018-2021	71
Tabel 6.1	: Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2016	86

Tabel 6.2	: Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2017-2021	86
Tabel 6.3	: Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2017-2021	87

**REVIEW
RENCANA
STRATEGIS
DINAS PEKERJAAN
UMUM DAN
PERUMAHAN
KOTA BLITAR
TAHUN 2011 – 2015**



DINAS

REVIEW
RENCANA
STAP. 0342-80143,
DINAS PEKERJAAN
Fax. 0342-800395
UMUM DAN
PERUMAHAN
KOTA BLITAR
TAHUN 2011 – 2015



DINAS

Jl. A. Yani No. 20

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar Tahun 2016 – 2021 sebagai sebuah Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2016 – 2021

Dokumen Renstra ini dihasilkan melalui suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan tahun 2021 secara sistematis dan berkesinambungan dengan mempertimbangkan faktor-faktor antara lain, kondisi riil, potensi, hambatan, resiko serta pengembangan kedepan, sehingga sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat mendukung perwujudan visi dan misi Kota Blitar. Proses tersebut telah menghasilkan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar yang memuat tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai dengan tahun 2021.

Erat kaitannya dengan pencapaian visi misi Kota Blitar, maka dokumen perencanaan strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar harus dapat mengintegrasikan kepentingan dari berbagai unsur dan komponen yang ada serta dapat diimplementasikan dalam rencana kerja tahunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar.

1.2 LANDASAN HUKUM

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar Tahun 2016-2021, didasarkan atas beberapa ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, nomor 47,(tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4287) ;
2. Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 104, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
4. Undang-Undang nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007);
5. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
6. Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan pemerintah No 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah ;
11. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan nomor 21 tahun 2011 ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 08 tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) ;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 03 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah provinsi Jawa Timur tahun 2014-2019 ;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 05 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur tahun 2011-2031 ;
17. Peraturan Daerah Kota Blitar nomor 12 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar tahun 2011 – 2030 ;
18. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 02 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Blitar Tahun 2005 – 2025 ;

19. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 04 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah ;
20. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 06 tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar tahun 2016 – 2021 ;
21. Peraturan Walikota Blitar Nomor 60 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar ;
22. Peraturan Walikota Blitar Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Walikota Blitar Nomor 81 Tahun 2016 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar 2016-2021 di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Maksud penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan pembangunan khususnya dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang pada Tahun 2016-2021.

b. Tujuan

Adapun tujuan adalah memberikan gambaran dan arahan tentang rencana pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan khususnya bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar Tahun 2016 – 2021 disusun dengan tata urut sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN

Berisi uraian pendahuluan, yang secara rinci berisi uraian penjelasan umum latar belakang penyusunan Renstra, maksud dan tujuan disusunnya Renstra, landasan hukum penyusunan Renstra dan sistematikan penulisan Renstra.

Bab II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Berisi informasi tentang peran (tugas, pokok dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki

Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

Bab III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang

Bab IV TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Memuat tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar untuk kurun waktu pembangunan infrastruktur 5 tahun ke depan.

Bab V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar pada Tahun 2016 – 2021.

Bab VI INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab VII PENUTUP

Berisi uraian tentang kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar Tahun 2016 – 2021, khususnya arahan agar Renstra dijadikan pedoman penyusunan

Rencana Kinerja Tahunan dan sebagai dasar untuk evaluasi kinerja Perangkat Daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Blitar Nomor : 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar adalah sebagai berikut :

1. Tugas

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta bidang pertanahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

2. Fungsi

1. Perumusan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta bidang pertanahan
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta bidang pertanahan
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta bidang pertanahan
4. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan
5. Pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja.
6. Penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor.
7. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP).
8. Pelaksanaan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD)
9. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

10. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan
11. Pengelolaan pengaduan masyarakat.
12. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan pekerjaan umum dan penataan ruang dan bidang pertanahan secara berkala melalui sub domain website Pemerintah Daerah
13. Pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan bidang pertanahan
14. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya

Adapun tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Sekretariat

Sekretariat Dinas dipimpin oleh seorang Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas meliputi perencanaan, mengkoordinasikan tugas pada bidang - bidang, pengelolaan administrasi umum, rumah tangga, administrasi kepegawaian, kearsipan dan administrasi keuangan.

Untuk menjalankan tugas dimaksud, Sekretariat Dinas mempunyai fungsi :

1. Pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Kepala Dinas ;
2. Pengkoordinasian dan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja masing - masing bidang secara terpadu ;
3. Pengkoordinasian dan fasilitasi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi bidang-bidang di lingkungan Dinas ;
4. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan penyusunan program / kegiatan Sekretariat ;
5. Pengkoordinasian dan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ;
6. Pengkoordinasian dan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) ;
7. Pengkoordinasian penyusunan dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);

8. Fasilitas penyusunan Penetapan Kinerja (PK) ;
9. Pengkoordinasian dan fasilitas peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
10. Pengkoordinasian internal dan eksternal serta pembinaan penyelenggaraan organisasi dan tatalaksana organisasi Dinas.
11. Pengkoordinasian dan fasilitas pengelolaan urusan rumah tangga dan tata usaha Dinas ;
12. Pengkoordinasian dan fasilitas administrasi perjalanan dinas, tugas-tugas keprotokolan dan kehumasan
13. Pengkoordinasian dan fasilitas pengelolaan administrasi perlengkapan, sarana - prasarana, keamanan kantor dan penyelenggaraan rapat-rapat dinas ;
14. Fasilitas pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi ;
15. Fasilitas pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi ;
16. Fasilitas penyusunan dan .pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah ;
17. Pengkoordinasian pengusulan penataan organisasi, tata laksana dan produk hukum lainnya ;
18. Fasilitas verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan ;
19. Pengkoordinasian penyusunan tindak lanjut hasil pemeriksaan
20. Fasilitas dan koordinasi penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
21. Fasilitas dan koordinasi penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) masing-masing bidang dan Standar Pelayanan Publik (SPP) ;
22. Fasilitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) ;
23. Fasilitas pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan ;
24. Fasilitas penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban

Walikota (LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) ;

25. Pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan bidang pertanahan;
26. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan bidang Pertanahan secara berkala melalui sub domain website Pemerintah Daerah;
27. Penyelenggaraan, pembinaan dan pengendalian pelayanan administrasi umum, kepegawaian, kearsipan dan penatausahaan keuangan
28. Penyelenggaraan dan pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan informasi dan publikasi
29. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja Dinas ;
30. Pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretariat Dinas membawahi :

1. Sub Bagian Umum, Keuangan dan Penatausahaan Barang

Tugas :

- a. Menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional di bidang administrasi umum, keuangan dan penatausahaan barang;
- b. Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan administrasi umum, keuangan dan penatausahaan barang;
- c. Menyusun dan melaksanakan rencana program dan / atau kegiatan Sub Bagian Umum, Keuangan dan Penatausahaan Barang
- d. Menyelenggarakan kegiatan pelayanan administrasi umum, penatausahaan barang dan administrasi pengelolaan keuangan serta pertanggungjawaban keuangan
- e. Melakukan penatausahaan keuangan Dinas dan pengelolaan urusan gaji pegawai Dinas, serta verifikasi surat pertanggungjawaban (SPJ)

- f. Penyiapan usulan pejabat pengelola keuangan di lingkup Dinas
- g. Melaksanakan dan mengelola surat - menyurat dan tata kearsipan
- h. Melaksanakan dan mengelola urusan rumah tangga, protokoler, upacara dan rapat dinas
- i. Pengelolaan administrasi perjalanan dinas dan tugas-tugas kehumasan
- j. Melaksanakan urusan keamanan, kebersihan dan tata laksana
- k. Melaksanakan dan pengendalian tata usaha pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, perawatan barang inventaris sesuai ketentuan yang berlaku
- l. Melaksanakan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi
- m. Melaksanakan kebijakan pengelolaan barang milik daerah
- n. Melakulan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas, pendataan hasil kerja serta menyusun pelaporan kinerja administrasi umum, keuangan dan penatausahaan barang
- o. Melaksanakan pengkoordinasian penyusunan rencana anggaran yang mencakup rencana anggaran operasional dan rencana anggaran kegiatan masing-masing unit dilingkungan Dinas
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya

2. Sub Bagian Program dan Kepegawaian

Tugas :

- a. Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional di bidang program dan kepegawaian ;
- b. Melaksanakan pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan masing-masing unit dilingkungan Dinas;
- c. Menyusun, melaksanakan rencana program dan/atau kegiatan;

- d. Melakukan kegiatan pelayanan kegiatan program dan kepegawaian dilingkungan Dinas;
- e. Melaksanakan penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Rencana Kinerja Tahunan Dinas;
- f. Melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Dinas;
- g. Melaksanakan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas dan Dokumen Perubahannya;
- h. Melaksanakan penyusunan Penetapan Kinerja (PK);
- i. Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- j. Melaksanakan fasilitasi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan peraturan perundangan;
- k. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas, pendataan hasil kerja serta menyusun pelaporan kinerja administrasi program dan kepegawaian;
- l. Menyusun, mengelola dan memelihara data administrasi kepegawaian
- m. Melaksanakan pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang kepegawaian;
- n. Menyusun dan melaksanakan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- o. Melaksanakan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya

b. Bidang Tata Ruang

Bidang Tata Ruang mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan program dan/atau kegiatan di Bidang Tata Ruang.

Untuk menjalankan tugas dimaksud, Bidang Tata Ruang mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Tata Ruang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Kepala Dinas;

2. Penyusunan dan pelaksanaan program / kegiatan di bidang Tata Ruang
3. Penyusunan perencanaan operasional program Tata Ruang sesuai dengan perencanaan strategis tingkat kota, provinsi dan nasional;
4. Pemberian rekomendasi teknis pemanfaatan rencana tata ruang wilayah kota;
5. Pengendalian dan monitoring pemanfaatan rencana tata ruang wilayah kota;
6. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan pelayanan tata bangunan serta pengendalian pemanfaatan ruang ;
7. Pemutakhiran data di bidang Tata Ruang ;
8. Penyiapan data sebagai bahan penyusunan norma, standart, prosedur dan kriteria tata ruang :
9. Pelaksanaan kegiatan survey dan pemetaan tata ruang :
10. Penyusunan dan penetapan rencana rinci tata ruang (rencana detail dan rencana teknis) secara terpadu dengan SKPD terkait;
11. Fasilitasi pelayanan teknis dan administrasi bidang tata kota; pelaksanaan sosialisasi dan implernentasi bidang tata kota ;
12. Pengawasan terhadap pemenuhan standart nasional bidang Tata Ruang ;
13. Melaksanakan koordinasi, kerjasama dan pembinaan dalam peningkatan pelayanan penyelesaian sertifikasi hak-hak tanah, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan ;
14. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi bidang tata ruang sesuai kewenangannya
15. Pembinaan, pengendalian dan pelaporan kinerja di bidang Tata Ruang ;
16. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Tata Ruang membawahi :

1. Seksi Perencanaan Tata Ruang

Tugas :

- a. Menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perurnusan kebijakan operasional di bidang perencanaan tata ruang;
- b. Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan di bidang perencanaan tata ruang;

- c. Menyusun dan melaksanakan rencana program dan/ atau kegiatan di Seksi Perencanaan Tata Ruang;
- d. Melaksanakan penyusunan dan penetapan RTRW, RTRKS, RDTRK;
- e. Menyusun petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian tata ruang kota.
- f. Menyusun kriteria penentuan dan perubahan fungsi ruang kawasan/lahan wilayah dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang;
- g. Merumuskan kebijakan strategis operasionalisasi RTRW dan RTRKS;
- h. Sosialisasi Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) dan SPM bidang penataan ruang;
- i. Pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang kota;
- j. Penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat;
- k. Penyiapan bahan koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian tata ruang;
- l. Pemberian konsultasi perencanaan dan pengendalian tata ruang;
- m. Penyiapan bahan kerja sama penataan ruang antar daerah dan antar daerah dengan swasta
- n. Pemberian bimbingan , supervisi dan konsultasi perencanaan tata ruang
- o. Memantau dan menganalisa pelaksanaan tugas serta menyusun laporan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Kota sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Seksi Pengendalian Ruang

Tugas :

- a. Menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional di bidang pengendalian dan monitoring tata ruang;
- b. Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan urusan pengendalian dan monitoring tata ruang;

- c. Menyusun dan melaksanakan rencana program dan/atau kegiatan seksi pengendalian ruang;
- d. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pengendalian tata ruang dan bangunan;
- e. Penyiapan bahan pelaksanaan lingkup pengendalian tata ruang dan bangunan meliputi pengawasan tata ruang dan bangunan, penanganan pengaduan dan sengketa serta pengusutan dan penertiban
- f. Penyiapan bahan pelaksanaan pengkoordinasian monitoring, pengawasan dan pengendalian evaluasi dan pelaporan lingkup pengendalian tata ruang dan bangunan;
- g. Pelaksanaan koordinasi penerapan atribut kota hijau (Green City);
- h. Pelaksanaan Koordinasi penyusunan teknis lingkup pengendalian tata ruang dan bangunan;
- i. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan penerbitan rekomendasi izin mendirikan bangunan (IMB);.
- j. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas serta penyusunan laporan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya;
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Kota sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Seksi Pertanahan

Tugas :

- a. Menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perurnusan kebijakan operasional di bidang pertanahan
- b. Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan di bidang pertanahan
- c. Menyusun dan melaksanakan rencana program dan/ atau kegiatan di Seksi Pertanahan
- d. Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan administrasi pertanahan
- e. Menyusun dan melaksanakan rencana program dan/atau kegiatan administrasi pertanahan daerah
- f. Menyiapkan data sebagai bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan administrasi pertanahan
- g. Menyiapkan data sebagai bahan pembinaan administrasi keagrariaan sesuai dengan kewenangan Daerah

- h. Menyiapkan data sebagai bahan pengkajian dan kerjasama dalam penyelesaian sengketa/kasus-kasus pertanahan, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan dan kewenangan Daerah
- i. Menyiapkan data sebagai bahan penyempurnaan dan penyusunan kebijakan, ketentuan dan standar prosedur, variabel dan indikator kinerja pelaksanaan sertifikasi hak-hak tanah
- j. Melaksanakan koordinasi, kerjasama dan pembinaan dalam peningkatan pelayanan penyelesaian sertifikasi hak-hak tanah, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan
- k. Menyiapkan data sebagai bahan pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan penyuluhan sistem pendaftaran tanah dalam penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
- l. Memantau dan menganalisa pelaksanaan tugas serta menyusun laporan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Ruang sesuai dengan bidang tugasnya

c. Bidang Cipta Karya dan Bina Konstruksi

Bidang Cipta Karya dan Bina Konstruksi mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan program dan/atau kegiatan di bidang Cipta Karya dan Bina Konstruksi.

Untuk menjalankan tugas dimaksud, Bidang Cipta Karya dan Bina Konstruksi mempunyai fungsi :

- 1. Penyusunan dan pelaksanaan program / kegiatan di bidang Cipta Karya dan Bina Konstruksi ;
- 2. Perencanaan operasional program bidang Cipta Karya dan Bina Konstruksi sesuai dengan perencanaan strategis tingkat kota, provinsi dan nasional;
- 3. Fasilitasi pembangunan, renovasi dan rehabilitasi bangunan gedung dan rumah negara yang menjadi aset pemerintah daerah;
- 4. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria Cipta Karya dan Bina Konstruksi;
- 5. Pelaksanaan analisa data sebagai bahan penetapan dan daya guna bangunan gedung dan rumah negara;

6. Pengusulan penetapan status bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan berskala lokal;
7. Pelaksanaan monitoring dan penertiban pelestarian bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan berskala lokal;
8. Fasilitasi upaya penyelamatan bangunan gedung dan rumah Negara
9. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pembangunan, perbaikan dan pemeliharaan prasarana permukiman di bidang air limbah, drainase dan air minum;
10. Pelaksanaan monitoring pembangunan gedung milik pemerintah;
11. Pelaksanaan pengolahan dan pengelolaan dokumentasi dan data bangunan gedung pemerintah;
12. Pelaksanaan bimbingan teknis/sosialisasi dan informasi dalam perencanaan pendirian bangunan gedung serta bangunan pendukung lainnya;
13. Pelaksanaan monitoring dan pembinaan jasa konstruksi;
14. Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan kota;
15. Pelaksanaan koordinasi, kerjasama dan penyelenggaraan pelayanan bina konstruksi;
16. Pelaksanaan pembinaan dan monitoring teknis bangunan - gedung, jalan, jembatan, drainase, air bersih dan bangunan konstruksi lainnya kepada SKPD/instansi dan masyarakat;
17. Pelaksanaan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi Cipta Karya dan Bina Konstruksi;
18. Pembinaan, pengendalian dan pelaporan kinerja di bidang Cipta Karya dan Bina Konstruksi;
19. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Cipta Karya dan Bina Konstruksi membawahi :

1. Seksi Bangunan Gedung, Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungan

Tugas :

- a. Menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional di bidang Bangunan Gedung, Penataan Bangunan dan Lingkungan;

- b. Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan di bidang Bangunan Gedung, Penataan Bangunan dan Lingkungan;
- c. Menyusun dan melaksanakan rencana program dan/atau kegiatan bidang Bangunan Gedung, Penataan Bangunan dan Lingkungan;
- d. Melaksanakan pembangunan, renovasi dan rehabilitasi bangunan gedung dan rumah negara yang menjadi aset pemerintah daerah;
- e. Menyiapkan data sebagai bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria Bangunan Gedung, Penataan Bangunan dan Lingkungan;
- f. Melakukan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi tata bangunan gedung;
- g. Melakukan pendataan hasil kerja tata bangunan gedung;
- h. Mengumpulkan data sebagai bahan penetapan dan daya guna bangunan gedung;
- i. Melakukan upaya penyelamatan bangunan gedung ;
- j. Melaksanakan pengelolaan dokumentasi dan data bangunan gedung pemerintah;
- k. Melaksanakan sosialisasi dan informasi dalam perencanaan pendirian bangunan gedung serta bangunan pendukung lainnya;
- l. Melaksanakan pemberian bantuan teknik pembangunan gedung daerah serta pelaksanaan upaya keselamatan bangunan gedung daerah dan bangunan umum lainnya;
- m. Melaksanakan penyusunan pedoman dan manual perencanaan pembangunan dan pengelolaan prasarana dan sarana umum;
- n. Melaksanakan monitoring dan penertiban pembangunan bangunan gedung;
- o. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas serta penyusunan laporan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya;
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Cipta Karya dan Bina Konstruksi sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Seksi Sanitasi, Air Minum dan Drainase

Tugas :

- a. Menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional sanitasi, air minum dan drainase;
- b. Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan sanitasi, air minum dan drainase;
- c. Menyusun dan melaksanakan rencana program dan/atau kegiatan Seksi Sanitasi, Air Minum dan Drainase;
- d. Melaksanakan kegiatan pembangunan, pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian prasarana dan sanitasi, air minum dan drainase berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan oleh pemerintah;
- e. melaksanakan kegiatan pembangunan, pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian prasarana dan fasilitasi pengembangan sistem penyediaan air minum
- f. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas serta menyusun laporan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya;
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Cipta Karya dan Bina Konstruksi sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Seksi Bina Teknik dan Konstruksi

Tugas :

- a. Menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional bina teknik dan konstruksi;
- b. Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan bina teknik dan konstruksi;
- c. Menyusun dan melaksanakan rencana program dan/ atau kegiatan di Seksi Bina Teknik dan Konstruksi
- d. Menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria Bina Teknik dan Konstruksi
- e. Menyiapkan bahan sebagai bahan pelaksanaan monitoring dan pembinaan jasa konstruksi
- f. Menyelenggarakan sistem informasi jasa konstruksi cakupan kota
- g. Melaksanakan verifikasi kelengkapan dan kelayakan dokumen - perencanaan teknis bangunan gedung, jalan,

jembatan, drainase, air bersih dan bangunan konstruksi lainnya

- h. Melaksanakan sosialisasi peraturan perundangan tentang teknis bangunan gedung, jalan, jembatan, drainase, air bersih dan bangunan konstruksi lainnya kepada SKPD/instansi dan masyarakat
- i. Melaksanakan pendampingan penyusunan perencanaan teknis konstruksi kepada SKPD / instansi dan masyarakat
- j. Melaksanakan koordinasi, kerjasama dan penyelenggaraan pelayanan bina teknis
- k. Melaksanakan pembinaan dan monitoring teknis bangunan gedung, jalan, jembatan, drainase, air bersih dan bangunan. konstruksi lainnya kepada SKPD/instansi dan masyarakat
- l. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas serta menyusun laporan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya
- m. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Cipta Karya dan Bina Konstruksi sesuai dengan bidang tugasnya.

d. Bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air

Bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan program dan/atau kegiatan di bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air.

Untuk menjalankan tugas dimaksud, Bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air mempunyai fungsi :

- 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Kepala Dinas;
- 2. Penyusunan program / kegiatan di bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air;
- 3. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan pelayanan di bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air;
- 4. Pembuatan kebijakan standar, norma, kriteria, dan prosedur serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air;

5. Perencanaan operasional program bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air sesuai dengan perencanaan strategis tingkat provinsi dan nasional;
6. Pelaksanaan kegiatan pemantauan, studi kelayakan dan AMDAL dalam rangka pengembangan jaringan jalan dan pemanfaatan jalan, jaringan pengairan serta pemanfaatan pengairan;
7. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan pelayanan pembangunan jalan, peningkatan jalan serta pembangunan dan peningkatan jembatan;
8. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan pelayanan pemeliharaan jalan, pemeliharaan jembatan dan irigasi serta pemanfaatan peralatan;
9. Pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan drainase, tembok penahan, resapan air hujan dan penyediaan jalan lingkungan;
10. Pelaksanaan sosialisasi di bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air;
11. Pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional di bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air;
12. Pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air ;
13. Pembinaan, pengendalian dan pelaporan kinerja di bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air;
14. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja di bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air;
15. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang **Bina Marga dan Sumber Daya Air** membawahi :

1. Seksi Jalan dan Jembatan

Tugas :

- a. Menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional di bidang Jalan dan Jembatan;
- b. Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan Jalan dan Jembatan;
- c. Menyusun dan melaksanakan rencana program dan/ atau kegiatan bidang Jalan dan Jembatan;
- d. Menyiapkan data sebagai bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang Jalan dan Jembatan

- e. Melaksanakan survey dan pengamatan lapangan dalam rangka penyusunan rencana gambar mengenai jalan dan jembatan;
- f. Mengkoordinasikan dan penyelenggaraan pelayanan pembangunan jalan, peningkatan jalan serta pembangunan dan peningkatan jembatan;
- g. Mengkoordinasikan dan penyelenggaraan pelayanan pemeliharaan jalan dan pemeliharaan jembatan;
- h. Melaksanakan inventarisasi kondisi jembatan serta penanggulangan akibat bencana alam;
- i. Melakukan kegiatan penanggulangan kerusakan jalan dan jembatan;
- j. Melaksanakan penyusunan data jalan dan jembatan serta penyusunan leger jalan dan jembatan;
- k. Melaksanakan pendataan dan evaluasi terhadap status dan manfaat jalan;
- l. Melakukan penelitian dan pengujian tentang keadaan tanah, bahan jalan dan jembatan;
- m. Melaksanakan pengujian terhadap kualitas hasil pekerjaan pembangunan jalan dan jembatan;
- n. Melaksanakan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi bidang Jalan dan Jembatan;
- o. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas serta penyusunan laporan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya;
- a. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Seksi Sumber Daya Air

Tugas :

- a. Menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional di bidang Pengelolaan Sumber Daya Air;
- b. Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan Pengelolaan Sumber Daya Air;
- c. Menyusun rencana program dan/atau kegiatan pada Seksi Sumber Daya Air;
- d. Menyiapkan data sebagai bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang Pengelolaan Sumber Daya Air;

- e. Menyiapkan bahan dalam rangka mendirikan bangunan sarana dan prasarana sumber daya air, penggunaan tanah pengairan, air permukaan dan sumber air;
- f. Melakukan pengendalian dan pengawasan perbaikan jaringan irigasi dan sungai;
- g. Melaksanakan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan sumber daya air dan saluran irigasi;
- h. Melaksanakan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan drainase perkotaan;
- i. Melakukan pendataan hasil kerja bidang Pengelolaan Sumber Daya Air;
- j. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas serta penyusunan laporan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya;
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Seksi Operasional dan Pemeliharaan

Tugas :

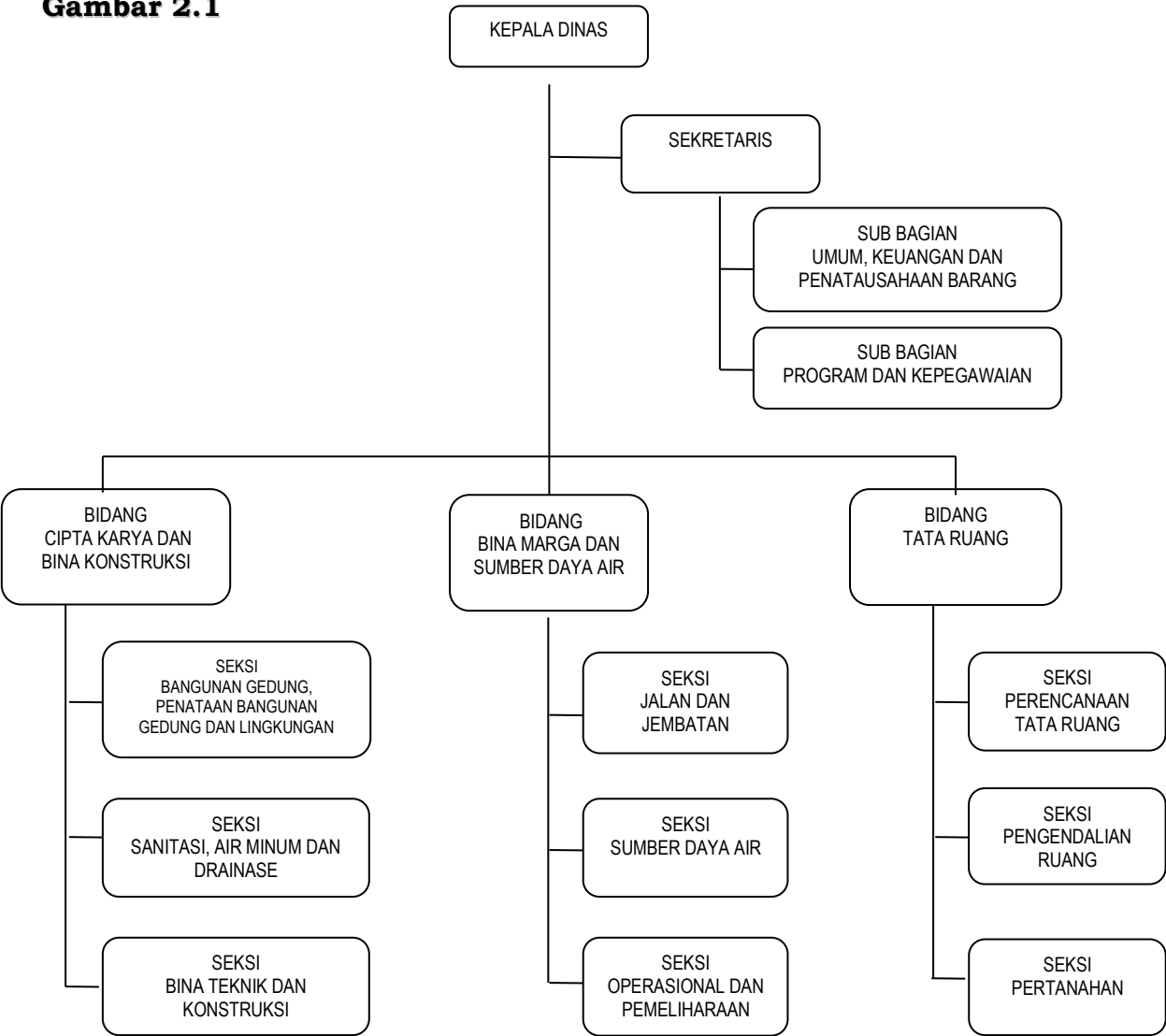
- a. Menyiapkan dan melaksanakan inventarisasi data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana jalan, jembatan, sumber daya air dan jaringan irigasi;
- b. Mengumpulkan dan melaksanakan inventarisasi kondisi kerusakan sarana jalan, jembatan, sumber daya air dan jaringan irigasi sebagai bahan koordinasi dan pelaksanaan teknis pemeliharaan
- c. Menyusun dan melaksanakan rencana program dan/ atau kegiatan pada Seksi Operasional dan Pemeliharaan
- d. Mengkoordinasikan dan penyelenggaraan pelayanan pemeliharaan jalan, pemeliharaan jembatan, pemeliharaan sumber daya air dan pemeliharaan jaringan irigasi
- e. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas serta penyusunan laporan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya
- f. Mengumpulkan data penelitian dan pengujian sebagai bahan koordinasi dan pelaksanaan pemeliharaan
- g. Melaksanakan bimbingan, pengawasan; pengendalian dan pelaksanaan kegiatan operasional dan pemeliharaan

- h. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan penggunaan peralatan operasional
- i. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas serta penyusunan laporan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air sesuai dengan bidang tugasnya

4. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar dapat di jabarkan sebagai berikut :

Gambar 2.1



a. Kepala Dinas,

b. Sekretariat Dinas, membawahi :

- Sub Bagian Umum, Keuangan dan Penatausahaan Barang
- Sub Bagian Program dan Kepegawaian.

c. Bidang Cipta Karya dan Bina Konstruksi, membawahi :

- Seksi Bangunan Gedung, Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungan
- Seksi Sanitasi, Air Minum dan Drainase
- Seksi Bina Teknik dan Konstruksi

d. Bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air, membawahi :

- Seksi Jalan dan Jembatan
- Seksi Sumber Daya Air
- Seksi Operasional dan Pemeliharaan

e. Bidang Tata Ruang, membawahi :

- Seksi Perencanaan Tata Ruang
- Seksi Pengendalian Ruang
- Seksi Pertanahan

2.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

Dalam upaya meningkatkan kinerja Perangkat Daerah, salah satu aspek yang sangat mendukung adalah tersedianya SDM baik ditinjau dari segi kecukupan akan kuantitas juga ditinjau dari segi kualitas SDM. Berikut dijelaskan kondisi SDM yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar adalah sebagai berikut :

a. Susunan Kepegawaian

Dukungan personil pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar dapat diperinci sebagai berikut :

Tabel 2.1
Komposisi Pegawai menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Keterangan
1	Laki – Laki	24 orang	
2	Perempuan	8 orang	
Jumlah		32 orang	

Data : bulan Maret 2017

Tabel 2.2
Komposisi Pegawai menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Latar Belakang Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1	Pasca Sarjana S-2	Magister Teknik (MT)	1 orang	
		Magister Sains (M.Si)	1 orang	
2	Sarjana S-1	- Teknik Sipil	6 orang	
		- Teknik Arsitektur	3 orang	
		- Teknik Geodesi	1 orang	
		- Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota	2 orang	
		- Desain Interior	1 orang	
		- Administrasi Negara	1 orang	
		- Ekonomi	3 orang	
		- Kehutanan	1 orang	
3	Diploma D-3	- Teknik Bangunan	3 orang	
		- Pendidikan	1 orang	
4	STM	- Mesin	2 orang	
		- Listrik	2 orang	
		- Bangunan	3 orang	
5	SMA / Sederajat		7 orang	
6	SLTP		1 orang	
7	SD		1 orang	

Data : bulan Maret 2017

Tabel 2.3
Komposisi Pegawai menurut Pangkat / Golongan Ruang

No	Golongan		Jumlah	Keterangan
1	Pembina Utama Muda	IV / c	1 orang	
2	Pembina Tingkat I	IV / b	1 orang	
3	Pembina	IV / a	1 orang	
Jumlah Golongan IV			3 orang	
2	Penata Tk. I	III/d	8 orang	
	Penata	III/c	7 orang	
	Penata Muda Tk. I	III/b	2 orang	
	Penata Muda	III/a	2 orang	
Jumlah Golongan III			19 orang	

3	Pengatur	II/c	6 orang	
	Pengatur Muda Tk. I	II/b	1 orang	
	Pengatur Muda	II/a	2 orang	
Jumlah Golongan II			9 orang	
4	Juru Tk. I	I/d	0 orang	
	Juru	I/c	1 orang	
Jumlah Golongan I			1 orang	
Jumlah Keseluruhan			32 orang	

Data : bulan Maret 2017

Tabel 2.4
Pegawai yang mengikuti Diklat Struktural

No	Diklat Struktural	Jumlah	Keterangan
1	Diklatpim Tk. II	1 orang	
2	Diklatpim Tk. III	4 orang	
3	Diklatpim Tk. IV	7 orang	

Data : bulan Maret 2017

Tabel 2.5
Pegawai yang mengikuti Diklat Teknis Fungsional

No	Diklat Teknis Fungsional	Jumlah	Keterangan
1	Diklat Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah	13 Orang	
2	Diklat Pengelola Teknis Pembangunan Gedung Negara	4 Orang	
3	Diklat Hukum Kontrak Konstruksi	4 Orang	
4	Diklat Proteksi Kebakaran Bangunan Gedung dan Lingkungan Tingkat Dasar	2 Orang	
5	Diklat Perencanaan dan Pelaksanaan Prasarana dan Sarana Drainase Perkotaan	1 Orang	
6	Diklat Penyelenggaraan Perumahan	1 Orang	
7	Diklat Pengelolaan Rumah Susun Sewa	2 Orang	
8	Diklat Manajemen Prasarana dan Sarana Perkotaan	1 Orang	

9	Diklat Pengawasan Bangunan Gedung Negara	1 Orang	
10	Diklat Pengelolaan Data Jalan	1 Orang	
11	Diklat Pemeliharaan Jalan	2 Orang	
12	Pelatihan Manajemen Operasi dan Pemeliharaan / Perbaikan Alat Berat	1 Orang	
13	Diklat Pengawasan Jalan dan Jembatan	4 Orang	
14	Kursus Bangunan Tahan Gempa	2 Orang	
15	Kursus Sanitasi / PLP	3 Orang	
Jumlah		42 Orang	

Data : bulan Maret 2017

b. Sarana dan Prasarana

Selain Aspek SDM, Sarana Prasarana sangat dibutuhkan dalam upaya mendukung pelaksanaan tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar. Adapun Sarana Prasarana yang ada dapat dikelompokkan sebagai berikut :

Tabel 2.6
Barang Tidak Bergerak

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	KETERANGAN
I	Bidang Tanah	2760 m ²	
II	Bangunan Gedung	988 m ²	

Tabel 2.7
Alat – Alat Berat / Bermesin

NO	NAMA BARANG	JUMLAH (Unit)	KETERANGAN
1	Mesin Gilas 8 Ton	5	4 unit baik, 1 unit rusak
2	Mesin Gilas 2 Ton	3	1 unit sedang, 2 unit rusak
3	Mesin Gilas 1 Ton	2	Rusak berat
4	Stemper	1	Rusak
5	Mixer Beton	1	Rusak
6	Mobil Kijang Innova	1	Baik
7	Mobil Kijang Pick Up	1	Baik

8	Mobil Daihatsu Pick Up	1	Sedang
9	Mitsubishi Dump Truck	1	Baik
10	Isuzu Panther Pick Up	1	Baik
11	Sepeda Motor Roda 2	16	15 Baik, 1 Sedang
12	Sepeda Motor Roda 3	2	Baik
13	Core Drill BI - 400 A	1	Baik
14	Alphomain Road Maintenance Truck	1	Baik

Tabel 2.8
Alat – Alat Bengkel Tak Bermesin

NO	NAMA BARANG	JUMLAH (Unit)	KETERANGAN
1	Theodolite GTS 220 Series	1	Baik
2	Hammer Test CO-500	1	Baik
3	Sondir SO-200 (Kap 2,5 T)	1	Baik

Tabel 2.9
Peralatan Kantor / Mebeler

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	KETERANGAN
1	Meja Tulis 1 biro	6 bh	Baik
2	Meja Tulis ½ biro	43 buah	Baik
3	Meja Tamu	6 set	Baik
4	Meja Computer	12 buah	Baik
5	Kursi Putar	24 buah	Baik
6	Kursi Duduk	45 buah	Baik
7	Kursi Plastik / Napoli	56 buah	Baik
8	Kursi Rapat	100 buah	Baik
9	Almari	9 buah	Baik
10	Gambar Garuda, Presiden dan Wakil Presiden	3 buah	Baik
11	Jam tembok	7 buah	Baik
12	Filling kabinet	23 buah	Baik
13	Filling kayu	3 buah	Baik
14	Pot Bunga	17 buah	Baik
15	Rak besar	2 buah	Baik
16	Rak kecil	1 buah	Baik

17	Tempat minuman galon	5 buah	Baik
18	Rak tempat gambar	9 buah	Baik
19	Meja gambar	3 buah	Baik
21	Computer	13 buah	Baik
22	Laptop	5 buah	Baik
23	Mesin ketik	6 buah	Rusak
24	Kipas angin berdiri	8 buah	Baik
25	Papan Struktur Organisasi	1 buah	Baik

2.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Peran serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam mendukung Visi dan Misi pada Renstra Tahun 2016-2021 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar dimana Tahun 2015, Kondisi Fisik Prasarana dan Sarana Transportasi serta Permukiman Memadai untuk Mendukung Aktivitas Perkotaan Menuju Terwujudnya Kota Blitar sebagai Kota Jasa, Perdagangan dan Pariwisata melalui pembangunan sarana prasarana kota serta pembangunan infrastruktur yang berkualitas.

Bahwa sebagian besar jalan sudah diaspal dalam kondisi baik. Adapun kriteria / kelas jalan yang ada di Kota Blitar terdiri dari Jalan Nasional, Jalan Propinsi, Jalan Kota, dengan kondisi dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.10
Kriteria dan Kondisi Jalan

No.	Keadaan Jalan	Status Jalan (Km)					
		Jalan Nasional		Jalan Propinsi		Jalan Kota	
		2015	2016	2015	2016	2015	2016
I.	Jenis Permukaan						
	1. Aspal	8,000	8,000	5,510	5,510	261,206	262,162
	2. Tanah					2,334	1,432
	3. Lainnya					0,426	0,426
	Jumlah I	8.000	8.000	5.510	5.510	263,966	264,020
No.	Keadaan Jalan	Status Jalan (Km)					
		Jalan Nasional		Jalan Propinsi		Jalan Kota	
		2015	2016	2015	2016	2015	2016
II.	Kondisi Jalan						
	1. Baik	6.350	6.350	3.051	3.051	261,206	262,162
	2. Sedang	1.650	1.650	2.459	2.459	2,334	1,432
	3. Rusak					0,426	0,426
	4. Rusak Berat						
	Jumlah II	8.000	8.000	5.510	5.510	263,966	264,020

Data : Dinas PU & Penataan Ruang Kota Blitar bulan Maret 2017

Selain sarana prasarana penunjang perkotaan dalam kondisi baik, masih ada bangunan-bangunan yang tidak sesuai dengan peruntukan atau tata guna lahan yaitu bangunan-bangunan yang melanggar sempadan jalan dan sungai.

Tingkat pencapaian kinerja Perangkat Daerah dijabarkan pada Matrik Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD (Tabel 2.11) dan Matrik Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD (Tabel 2.12) pada Renstra ini.

Tabel 2.11
Matrik Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD

Kinerja sesuai dengan tugas & fungsi SKPD	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SAT	Target Renstra Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio antara Target dan Realisasi Capaian Tahun ke				
			2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
Terwujudnya kualitas jalan dan jembatan, drainase, irigasi sesuai standar	1. Prosentase jalan dalam kondisi baik	%	80,00	80,00	80,00	80,00	100,00	70,00	70,00	70,00	80,00	98,95	87,50	87,50	87,50	100,00	98,95
	2. Prosentase jembatan dalam kondisi baik	%	80,00	80,00	80,00	80,00	100,00	70,00	70,00	70,00	80,00	97,28	87,50	87,50	87,50	100,00	97,28
	2. Prosentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	%	80,00	80,00	80,00	80,00	100,00	70,00	75,00	70,00	70,00	91,23	87,50	93,75	87,50	87,50	91,23
Terwujudnya kualitas lingkungan permukiman serta bangunan gedung sesuai standar dan berwawasan lingkungan	1. Meningkatnya jaringan air bersih bagi masyarakat	%	80,00	80,00	80,00	80,00	100,00	70,00	70,00	70,00	70,00	25,39	87,50	87,50	87,50	87,50	25,39
	2. Berkurangnya kawasan dengan kondisi sanitasi yang buruk	%	80,00	80,00	80,00	80,00	100,00	70,00	75,00	75,00	75,00	97,89	87,50	93,75	93,75	93,75	97,89
	3. Terciptanya bangunan gedung pemerintah yang representatif	unit		1,00	3,00	3,00	6,00		1,00	3,00	3,00	4,00		100,00	100,00	100,00	66,67
Tersedianya dokumen penataan ruang kota dengan didukung oleh peraturan perundangan serta peningkatan kualitas SDM dalam usaha penanganan penataan ruang	1. Tersedianya dokumen perencanaan penataan ruang	dok		1,00	2,00	2,00	1,00		1,00	2,00	2,00	1,00		100,00	100,00	100,00	100,00
	2. Peningkatan kualitas SDM dalam usaha penanganan penataan ruang	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	50,00	70,00	80,00	80,00	66,67	50,00	70,00	80,00	80,00	66,67
Meningkatkan penyediaan data base yang lengkap dan akurat	Tersedianya data base yang lengkap dan akurat	%	100,00	100,00	100,00	100,00	20,00	80,00	80,00	80,00	80,00	20,00	80,00	80,00	80,00	80,00	100,00
Terwujudnya kualitas bangunan pemerintah yang memenuhi SNI	Meningkatnya jumlah dokumen perencanaan bangunan infrastruktur yang sesuai SNI	dok		1,00	1,00	18,00	58,00		1,00	1,00	15,00	58,00		100,00	100,00	83,33	100,00
	Meningkatnya Keahlian Tenaga Perencana Teknis dengan memiliki SKA / SKT	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	30,00	80,00	0,00	0,00	0,00	30,00	80,00

Tabel 2.12
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	ANGGARAN	REALISASI
PENDAPATAN DAERAH	139.500.000,00	120.368.050,00	133.400.000,00	287.103.500,00	476.094.100,00	175.704.357,00	278.814.501,00	601.974.550,00	382.579.700,00	694.610.500,00	125,95%	231,63%	451,26%	133,25%	145,90%		
Pendapatan Asli Daerah	139.500.000,00	120.368.050,00	133.400.000,00	287.103.500,00	476.094.100,00	175.704.357,00	278.814.501,00	601.974.550,00	382.579.700,00	694.610.500,00	125,95%	231,63%	451,26%	133,25%	145,90%	44,54%	43,94%
BELANJA DAERAH	59.430.145.850,00	31.092.204.604,49	45.119.079.689,60	48.666.101.894,48	77.235.874.178,80	55.499.650.280,00	27.832.239.164,00	37.726.508.096,00	42.991.043.063,00	72.157.877.770,00	93,39%	89,52%	83,62%	88,34%	93,43%		
Belanja Tidak Langsung	2.343.101.850,00	2.347.187.811,00	2.320.197.002,50	2.548.424.177,48	2.410.506.475,00	2.071.618.295,00	2.208.192.873,00	2.263.575.744,00	2.170.528.999,00	2.351.912.922,00	88,41%	94,08%	97,56%	85,17%	97,57%	0,86%	0,14%

Belanja Langsung	57.087.044.000,00	28.745.016.793,49	42.798.882.687,10	46.117.677.717,00	74.825.367.703,80	53.428.031.985,00	25.624.046.291,00	35.462.932.352,00	40.820.514.064,00	69.805.964.848,00	93,59%	89,14%	82,86%	88,51%	93,29%	17,31%	18,12%
TOTAL	59.569.645.850,00	31.212.572.654,49	45.252.479.689,60	48.953.205.394,48	77.711.968.278,80	55.675.354.637,00	28.111.053.665,00	38.328.482.646,00	43.373.622.763,00	72.852.488.270,00	93,46%	90,06%	84,70%	88,60%	93,75%		

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN

Ketersediaan infrastruktur yang berkualitas merupakan salah satu faktor penentu daya tarik suatu kawasan / wilayah, disamping faktor kualitas lingkungan hidup, image, dan masyarakat (budaya).

Tahun 2015, bahwa kondisi fisik prasarana dan sarana transportasi serta permukiman kota Blitar memadai untuk mendukung aktifitas perkotaan menuju terwujudnya Blitar sebagai kota yang mengedepankan pemanfaatan APBD Pro-Rakyat.

Hal ini telah menunjukkan bahwa kondisi Kota Blitar yang diharapkan dapat diwujudkan apabila pelaksanaan pembangunan bidang pekerjaan umum dapat direalisasikan sesuai dengan rencana program dan kegiatan selama lima tahun kedepan, namun demikian dalam pelaksanaannya terdapat permasalahan dimana hal ini merupakan tantangan dalam pengembangan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar khususnya pembangunan infrastruktur.

Tantangan utama yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam menangani dua urusan wajib (Urusan Pekerjaan Umum dan Urusan Penataan Ruang) adalah :

1. Pesatnya perkembangan informasi dan teknologi.
2. Perubahan iklim yang tidak menentu, mempengaruhi jadwal kegiatan dilapangan
3. Kecenderungan pelanggaran terhadap tata ruang.
4. Potensi Sumber Daya Alam terbatas
5. Terbatasnya Sumber Daya Manusia yang ada

Sedangkan Peluang untuk mengembangkan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam melaksanakan dua urusan wajib (Urusan Pekerjaan Umum dan Urusan Penataan Ruang) adalah :

1. Tingkat pendidikan dari karyawan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar cukup memadai.
2. Tersedianya prasarana dan sarana operasional.
3. Adanya potensi pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, sarana dan prasarana di wilayah Kota Blitar.
4. Banyaknya Pengusaha Jasa Konstruksi di Kota Blitar.
5. Tersedianya tenaga kerja di pasar kerja yang cukup memadai.
6. Pelaksanaan prinsip APBD Pro Rakyat secara efektif

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam melaksanakan urusannya permasalahan yang dihadapi dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dengan perencanaan tata ruang untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah.
2. Antisipasi mitigasi bencana alam.
3. Akses sanitasi dan air bersih yang menjadi target kementrian, dimana akhir tahun 2019 semua penduduk harus memperoleh akses air bersih secara layak.
4. Rasio kecukupan penyediaan air minum layak bagi masyarakat.
5. Ketersediaan sumber air baku untuk air minum
6. Upaya hemat energi dan infrastruktur hijau (*green infrastructure*).
7. Keterpaduan infrastruktur dengan mengatasi degradasi lingkungan pada kawasan tertentu.
8. Belum terkoneksi penataan ruang dengan pembangunan sektoral
9. Menurunnya daya dukung kawasan strategis cepat tumbuh (kawasan pusat wilayah)
10. Penguatan karakter kawasan secara berkelanjutan (fisik, sosial, ekonomi) untuk mendukung Blitar sebagai pariwisata berbasis kekuatan ekonomi local
11. Konservasi kawasan bersejarah, menyangkut : pelestarian, pengembangan, dan perlindungan cagar budaya dan bangunan bersejarah yang banyak terdapat di Blitar

Permasalahan tersebut terjadi karena adanya faktor – faktor yang mempengaruhi antara lain :

1. Kurangnya jumlah SDM yang mendukung pelaksanaan kegiatan
2. Kurangnya pemahaman terhadap pedoman dalam pelaksanaan tugas.
3. Terbatasnya sumber mata air, sehingga membutuhkan anggaran yang besar untuk pemenuhan pelayanan air bersih
4. Belum optimalnya pelaksanaan pengawasan internal
5. Kondisi di lapangan yang variatif untuk segera ditangani

6. Kurangnya sinkronisasi data secara terpadu melalui jaringan IT
7. Kurangnya aturan yang mendukung pengendalian tata ruang

3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

a. Visi Kota Blitar 2016-2021 :

“ Masyarakat Kota Blitar Semakin Sejahtera melalui APBD Pro Rakyat pada Tahun 2021 “

b. Misi Kota Blitar 2016-2021 :

- 1.Meningkatkan aktualisasi nilai-nilai religius dalam kehidupan bermasyarakat.
- 2.Meningkatkan kualitas SDM yang cerdas dan berdaya saing tinggi.
- 3.Meningkatkan kemandirian ekonomi yang berorientasi pada industri pariwisata dan ekonomi kreatif yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan.
- 4.Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berbasis sistem pelayanan berkualitas dan partisipatif.
- 5.Meningkatkan keharmonisan sosial dengan semangat rukun agawe santoso.
- 6.Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan professional.

c. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran pada Misi ketiga yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar :

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1	Meningkatnya kualitas penataan ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	Meningkatnya ketersediaan informasi penataan ruang	Prosentase ketersediaan dokumen dan informasi tata ruang
2	Meningkatnya kinerja pelayanan infrastruktur	Persentase infrastruktur bidang pekerjaan	Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan	Persentase jalan dalam kondisi mantap dan berkeselamatan

	perkotaan	umum dalam kondisi baik	Meningkatnya kualitas infrastruktur jaringan irigasi	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik
			Meningkatnya kualitas sarana prasarana keciptakarya	1. Persentase bangunan gedung pemerintah yang sesuai standart
				2. Persentase rumah tangga yang memiliki akses air bersih
				3. Persentase rumah tangga yang memiliki akses air limbah
				4. Persentase saluran drainase dalam kondisi baik

3.3 TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROPINSI/KOTA

I. Renstra Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015-2019 (Permen PU dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13.1/PRT/M/2015)

Agenda prioritas di bidang pekerjaan umum adalah :

Pembangunan Infrastruktur pekerjaan umum

Arah kebijakan pembangunan infrastruktur bidang pekerjaan umum tahun 2015-2019 secara umum adalah untuk mewujudkan infrastruktur pekerjaan umum yang handal dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan, ketahanan air, kedaulatan energi, konektivitas bagi penguatan daya saing, dan layanan infrastruktur dasar melalui keterpaduan dan keseimbangan pembangunan antar daerah, antar sektor dan antar tingkat pemerintahan yang didukung dengan industri konstruksi nasional yang berkualitas dan sumber daya organisasi yang kompeten dan akuntabel.

Arah kebijakan tersebut lebih jauh meliputi :

1. Untuk meningkatkan ketahanan air, kedaulatan pangan dan kedaulatan energi guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi, akan dilakukan melalui pemenuhan kebutuhan air baku untuk segala kebutuhan peningkatan kinerja jaringan irigasi rawa, peningkatan pengendalian daya rusak air, peningkatan upaya konservasi sumber

- daya air, peningkatan kinerja operasi dan pemeliharaan sarana prasarana sumber daya air,
2. Untuk dukungan terhadap konektivitas nasional guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim, akan dilakukan melalui penurunan waktu tempuh pada koridor utama, peningkatan pelayanan jalan nasional, dan peningkatan fasilitasi terhadap jalan daerah untuk mendukung pengembangan kawasan

Kebijakan yang bersifat manajerial :

1. Untuk meningkatkan keseimbangan pembangunan antar daerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan, akan dilakukan melalui peningkatan keterpaduan perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR dengan pengembangan Kawasan Strategis baik di perkotaan, kluster industri maupun perdesaan, peningkatan keterpaduan infrastruktur PUPR dengan pengembangan Kawasan Strategis baik di perkotaan, kluster industri maupun perdesaan; serta peningkatan kapasitas dan pengendalian kualitas konstruksi nasional
2. Untuk meningkatkan pengendalian dan pengawasan internal, sumber daya manusia yang kompeten dan berintegritas, budaya organisasi yang berkinerja tinggi dan akuntabel, regulasi dan layanan hukum, data dan informasi publik, sarana dan prasarana serta kualitas inovasi teknologi terapan bidang PUPR guna mendukung penyelenggaraan pembangunan bidang PUPR yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel akan dilakukan melalui peningkatan kualitas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara, peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, peningkatan kompetensi sumber daya manusia PUPR sesuai dengan persyaratan jabatan, peningkatan pemanfaatan IPTEK bidang PUPR oleh *stakeholders*, dan peningkatan kualitas layanan teknis bidang PUPR kepada *stakeholders*, peningkatan kualitas dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya, peningkatan kualitas dukungan sarana dan prasarana aparatur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Strategi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam mendukung pencapaian agenda pembangunan Nasional adalah mengacu kepada RPJMN 2015-2019 dan berbasiskan pada keterpaduan infrastruktur wilayah, sesuai dengan rumusan tujuan yaitu :

a. Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum yang terpadu dan berkelanjutan didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antar daerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan

1. Keterpaduan infrastruktur wilayah

- Meningkatnya keterpaduan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum antar daerah, antar sektor dan antar tingkat pemerintahan, dengan sasaran program : Meningkatnya keterpaduan infrastruktur PUPR dengan pengembangan Kawasan Strategis baik di strategi :

- a. Perencanaan pengembangan kawasan dan koridor

- b. Pengembangan infrastruktur untuk keterpaduan kawasan, meliputi :

- a) Pelaksanaan percontohan/inkubasi pengembangan kawasan;

- b) Pengembangan kota baru dan cerdas (*smart cities*);

- c) Peremajaan perkotaan melalui *urban redevelopment / urbanrenewal*

- c. Pelaksanaan NSPK pengembangan kawasan strategis dan kawasan perkotaan

- d. Pelaksanaan dan fasilitasi percepatan pengadaan tanah

- Meningkatnya keterpaduan perencanaan, pemrograman dan penganggaran, dengan sasaran program. Meningkatnya keterpaduan perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR dengan pengembangan Kawasan Strategis baik di perkotaan, kluster industri maupun perdesaan, yang akan dicapai melalui strategi:

Perencanaan jangka panjang dan jangka menengah dan jangka pendek, meliputi:

- a) Penyusunan kebijakan teknis keterpaduan perencanaan dan pemrograman pembangunan infrastruktur PUPR dengan pengembangan wilayah;

- b) Penyusunan strategi nasional pengembangan perkotaan;

- c) Penyusunan Rencana Terpadu Pembangunan Infrastruktur PUPR 7 Pulau/Kepulauan;
- d) Penyusunan Skema pembiayaan infrastruktur PUPR;
- e) Penyusunan indeks rasio infrastruktur;
- f) Evaluasi dampak manfaat keterpaduan infrastruktur;
- g) Perumusan rekomendasi dukungan infrastruktur pada sektor yang terkait PUPR.
- b. Pemrograman jangka menengah dan jangka pendek, meliputi:
 - a) Sinkronisasi program jangka pendek dalam entitas wilayah (pulau / kepulauan, kawasan strategis, kawasan perkotaan);
 - b) Evaluasi kinerja keterpaduan;
 - c) Evaluasi kelayakan/kesiapan program dan kegiatan;
- c. Perencanaan penguatan kelembagaan dalam rangka keterpaduan

2. Pembinaan Konstruksi Nasional dan Fasilitasi Pengusahaan Infrastruktur.

Strategi :

- 1) Peningkatan kapasitas dan kualitas sistem, sumber daya, dan tata kelola dalam menghasilkan kebijakan dan rencana pembinan konstruksi agar efektif, terintegrasi dan berkelanjutan;
- 2) Peningkatan pembinaan penyelenggaraan dan investasi konstruksi agar tercipta tertib penyelenggaraan konstruksi yang produktif, efisien dan efektif, serta berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas BUJK, sumber daya manusia (SDM), dan masyarakat konstruksi;
- 3) Peningkatan pembinaan untuk mewujudkan BUJK yang berkualifikasi besar, sumber daya manusia (SDM), dan masyarakat konstruksi yang unggul, mandiri, profesional, berdaya saing tinggi;
- 4) Peningkatan penerapan manajemen mutu dan tertib penyelenggaraan konstruksi infrastruktur;
- 5) Peningkatan pengembangan informasi konstruksi dan penyediaan sumber daya konstruksi;
- 6) Peningkatan pengkajian, penyebarluasan, dan penerapan inovasi teknologi, investasi, dan ekonomi konstruksi yang berkelanjutan

- b. Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan ketahanan energi guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi

Pengelolaan Sumber Daya Air

Sasaran strategi :

- Meningkatkan dukungan ketahanan air
- Meningkatkan dukungan untuk kedaulatan pangan dan energi,

- c. Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum untuk konektivitas nasional guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim

Penyelenggaraan Jalan

Sasaran strategis :

- 1) Meningkatkan dukungan konektivitas bagi penguatan daya saing,
- 2) Meningkatkan kemantapan jalan nasional.

- d. Menyelenggarakan tata kelola sumber daya organisasi pembangunan bidang pekerjaan umum yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum rakyat yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, untuk mendukung terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian

1. Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur

Strategi :

- Peningkatan peran Inspektorat Jenderal sebagai *quality assurer* sehingga dapat menjadi *agent of change* untuk meningkatkan kapasitas manajemen Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- Peningkatan transparansi dan tertib administrasi dalam penyelenggaraan pembangunan dan terselenggaranya pembangunan dan infrastruktur bidang pekerjaan Umum dan permukiman yang bebas KKN
- Peningkatan kualitas hasil pengawasan

- Peningkatan penerapan zona integritas/ wilayah bebas korupsi

2. Peningkatan Dukungan Manajemen, Sarana dan Prasarana
Strategi :

- Peningkatan kualitas dukungan kesekretariatan dalam mendukung implementasi program pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat melalui penerapan prinsip-prinsip *good governance*
- Peningkatan kualitas dukungan kesekretariatan dalam mendukung implementasi program pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat melalui penerapan prinsip-prinsip *good governance*
- Peningkatan citra positif kementerian di mata publik
- Peningkatan kualitas pengelolaan BMN,
- Peningkatan pelayanan administrasi dan pembentukan peraturan perundangan serta bantuan hukum
- Pembinaan pengelolaan dan penyediaan data spasial/peta dan data literal/numerik bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat serta penyelenggaraan sistem informasi mendukung manajemen Kementerian
- Penciptaan kelembagaan kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang efektif, efisien, dan sinergis
Penguatan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi
- Penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang transparan, kompetitif, dan berbasis merit, yang meliputi :
- Peningkatan kualitas pelayanan publik
- Penerapan *e-government* untuk mendukung bisnis proses pemerintahan dan pembangunan yang efisien, efektif, transparan, dan terintegrasi

ii. Pengembangan Sumber Daya Manusia

Strategi :

- Penilaian Kompetensi, Pemetaan Karir dan Pemantauan Kinerja dalam rangka pelaksanaan sistem manajemen SDM aparatur
- Pemantauan Kinerja dan Evaluasi, untuk menilai kinerja individu khususnya terhadap kinerja organisasi

- Peningkatan kapasitas dan kompetensi melalui pendidikan, pelatihan, seminar, kursus dan penataran untuk mendukung pencapaian kinerja pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat
 - Pembinaan dan Pengembangan karir dan kompetensi Jabatan Fungsional Kementerian PUPR
- iii. Peningkatan Penelitian dan Pengembangan Strategi :
- Peningkatan penelitian dan pengembangan untuk mampu menghasilkan inovasi pada ilmu pengetahuan dan teknologi
 - Pemberian layanan keahlian untuk membantu memecahkan masalahmasalah lapangan yang menghasilkan umpan balik tentang jenis persoalan lapangan dan kemampooterapan teknologi dalam menyelesaikan masalah yang terjadi,

3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Kebijakan penataan ruang Kota di bidang pengelolaan lingkungan meliputi:

1. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sarana dan prasarana lingkungan permukiman;
2. Peningkatan pengelolaan kawasan yang berfungsi lindung

Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sarana dan prasarana lingkungan permukiman, meliputi :

1. Strategi Sanitasi Kota

2. Strategi Pengembangan Air Limbah Domestik

- 1) Meningkatkan pembiayaan sanitasi dengan melibatkan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Lembaga Donor.
- 2) Internalisasi program dan kegiatan sanitasi bagi pokja sanitasi dan aparatur pengelola air limbah.
- 3) Membangun sarana air limbah pada wilayah yang padat penduduk.
- 4) Mengoptimalkan kader lingkungan dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik

3. Strategi Pengembangan Drainase

1. Melakukan pendataan daerah yang sering terjadi genangan dan penyebab utamanya.

2. Melakukan identifikasi kerusakan saluran drainase dan pemetaan saluran drainase

4. Strategi Pengelolaan Air Bersih dan Air Minum

1. Meningkatkan pemecuan di Kelurahan yang rawan air.
2. Mengoptimalkan pengolahan, rehabilitasi jaringan perpipaan sehingga warga tidak meragukan kualitas air bersih dan air minum PDAM

5. Strategi terpadu perubahan iklim

Isu perubahan iklim menjadi salah satu tantangan bagi kota dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan; terutama dengan adanya hasil-hasil penelitian yang menunjukkan pengaruh kegiatan manusia terhadap terjadinya perubahan iklim ini. Maka dari itu, kota perlu menentukan sikap dalam menghadapi isu ini. Tidak hanya sebagai suatu tantangan, isu perubahan iklim ini tentunya juga harus diperlakukan sebagai suatu peluang; baik dari sisi peluang pendanaan maupun dari sisi pergeseran pola pikir masyarakat kearah yang lebih baik.

Adapun tujuan dari Strategi Terpadu Perubahan Iklim Kota Blitar adalah :

“Mewujudkan sinergi antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim menuju penurunan emisi GRK Kota Blitar sebesar 11% pada Tahun 2020”

Berdasarkan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Isu-isu Pembangunan berkelanjutan di Kota Blitar adalah sebagai berikut :

1. Terjadinya pengikisan nilai - nilai kebangsaan, nilai - nilai sejarah, budaya serta kearifan lokal
2. Kurangnya Ruang Terbuka Hijau publik
3. Menurunnya kualitas dan kuantitas sumber daya air
4. Belum optimalnya pengelolaan Pedagang Kaki Lima (PKL)
5. Penurunan luasan lahan pertanian

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) menjadi dasar bagi kebijakan, rencana dan program pembangunan dalam wilayah Kota Blitar.

1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah
 - Evaluasi permasalahan berdasarkan rencana tata ruang wilayah Kota Blitar saat ini banyak terjadi perubahan penggunaan lahan

yang tidak melalui perijinan dimana berdampak pada penataan dan pemanfaatan ruang.

- Ruang Terbuka Hijau yang mulai beralih fungsi menjadi perumahan dan pertokoan.
- Menurunnya luasan sempadan sungai karena adanya permukiman liar dan pertokoan di sekitar bantaran sungai.
- Kepastian hukum tentang sanksi pelanggaran tata ruang kota.

2. Kajian Lingkungan Hidup

- Menurunnya kuantitas dan kualitas sumber mata air dikarenakan semakin cepatnya pertumbuhan penduduk dan konversi lahan menjadi lahan perkotaan.
- Pencemaran air yang dikarenakan pembuangan sampah, tinja dan limbah rumah tangga mengakibatkan menurunnya kualitas air baik air tanah maupun air sungai.
- Sampah perkotaan pada Tempat Pembuangan Akhir yang tidak diolah secara maksimal menyebabkan kerusakan tanah dan pencemaran udara serta cepat habisnya tempat pembuangan sampah tersebut.

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis selain berasal dari permasalahan pembangunan di wilayah kota blitar, juga berasal dari analisis lingkungan eksternal. Analisis lingkungan eksternal dapat diambil dari berbagai informasi dari dunia internasional, kebijakan nasional (RPJMN), regional (RPJMD Provinsi Jawa Timur), dan lain-lain yang berdampak langsung pada pembangunan Kota Blitar selama lima tahun kedepan.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dalam melaksanakan urusannya terdapat banyak isu-isu strategis antara lain :

- a. *Isu kecukupan infrastruktur penunjang usaha dan kecukupan pemanfaatan jaringan teknologi komunikasi informasi* di suatu daerah akan meningkatkan peluang daya saingnya. Pengembangan sarana dan prasarana transportasi antar daerah dan pusat dan wilayah pelosok untuk mendukung sektor industri kreatif dan sektor pariwisata dan kemudahan aksesibilitas terhadap kegiatan skala nasional serta pengembangan infrastruktur dalam rangka mendukung daerah perkotaan sebagai pusat dan simpul utama kegiatan perdagangan barang sebagai pintu gerbang nasional. Alih fungsi lahan dan pengendalian ruang

pada kawasan beridentitas budaya lokal menjadi tantangan tersendiri Pemerintah Kota Blitar

- b. *Isu karakter dan identitas daerah*, penguatan karakter budaya kawasan dengan cara mengintegrasikan pembangunan karakter fisik lingkungan dengan pengembangan ekonomi wilayah dan pengembangan pariwisata nilai dan budaya berbasis kultural dan religius dalam memperkuat nilai dan karakter masyarakat Kota Blitar. Salah satu destinasi wisata nasional adalah wisata religi dan kebangsaan yaitu makam Bung Karno sang Proklamator. Selain Makam Proklamator, destinasi wisata lain di Kota Blitar adalah Perpustakaan Bung Karno, Istana Gebang, *Water Park* Sumber Udel dan wisata cagar budaya bersejarah lainnya, perlu dijaga keberadaanya dan kondisinya sebagai warisan budaya daerah. Perlu juga dikembangkan kampung tradisional dan potensi ekonomi lokal seperti batik, kuliner, budaya dan adat istiadat menjadi kekuatan besar Kota Blitar untuk bersaing dengan daerah lain.
- c. *Isu strategis lingkungan hidup* adalah bagaimana mengatasi degradasi lingkungan, meningkatkan kualitas lingkungan dan mengatasi perubahan iklim di Kota Blitar. Peningkatan kepadatan bangunan akibat pertambahan penduduk berimplikasi pada berkurangnya daerah-daerah resapan air dan krisis air tanah. Kondisi sistem drainase yang buruk di perkotaan memperparah terjadinya genangan dan banjir yang dapat membawa korban jiwa dan harta serta berbagai wabah penyakit. Masalah eksploitasi energi, mengakibatkan pemanasan global, perubahan iklim global, dan banjir cenderung meningkat. Dari ranah isu regulasi, perlu penegasan Implementasi Kebijakan tata ruang wilayah dan tata guna lahan, kebijakan kebersihan dan ketertiban, dan kebijakan pro lingkungan hidup yang berkelanjutan. Disamping itu, perlindungan masyarakat dari ancaman bencana oleh pemerintah merupakan wujud pemenuhan hak asasi rakyat. Isu strategisnya adalah menggeser paradigma dari penanggulangan bencana menuju pengelolaan mitigasi bencana

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

Tujuan dalam RENSTRA sesuai dengan Sasaran dalam RPJMD Kota Blitar dan Indikatornya menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar selama Tahun 2016 - 2021. Sedangkan Sasaran RENSTRA merupakan penjabaran atau implementasi dari Tujuan RENSTRA, dan Indikatornya menjadi Indikator Sasaran Strategis selama Tahun 2016 - 2021. Gambaran mengenai Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.1.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Rumus Perhitungan	Realisasi 2016	Sasaran	Indikator Sasaran	Rumus Perhitungan	Realisasi 2016
1	Meningkatkan kualitas penataan ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	Rata-rata penjumlah persentase kesesuaian setiap kawasan pada kawasan lindung dan kawasan budidaya	90,07%	1. Meningkatnya pemanfaatan ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kota	1. Tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang dengan dokumen rencana pemanfaatan ruang	Rata-rata penjumlah persentase kesesuaian setiap kawasan pada kawasan lindung dan kawasan budidaya	90,07%
2	Meningkatkan kinerja pelayanan infrastruktur perkotaan	Persentase jalan dalam kondisi mantap dan berkeselamatan	Rata-rata penjumlahan persentase jalan dalam kondisi baik, jalan dengan bahu jalan, jalan dengan trotoar dan jalan dengan pelengkap jalan dalam kondisi baik	73,54%	2. Meningkatnya kualitas jalan dan jaringan irigasi yang sesuai standar	1. Persentase jalan yang memenuhi kriteria mantap	Rata-rata penjumlahan persentase jalan dalam kondisi baik, jalan dengan bahu jalan, jalan dengan trotoar dan jalan dengan pelengkap jalan dalam kondisi baik	73,54%
						2. Persentase jembatan dalam kondisi baik	(Jumlah jembatan dalam kondisi baik dibagi jumlah jembatan total) x 100%	98,62%
						3. Persentase drainase dalam kondisi baik	(Panjang saluran drainase dalam kondisi baik dibagi panjang total saluran drainase) x 100%	80,00%
3	Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan air	1. Persentase Tingkat Pelayanan Air Bersih	(Jumlah rumah tangga yang memiliki akses air bersih dibagi jumlah rumah tangga) x 100%	80,94%	3. Meningkatnya Sarana dan Prasarana yang memadai guna meningkatkan	1. Persentase KK yang mendapat layanan air bersih yang layak	(Jumlah KK yang terlayani air limbah yang layak dibagi jumlah rumah tangga) x 100%	80,94%

	minum dan sanitasi	2. Persentase Tingkat Pelayanan Air Limbah	(Jumlah rumah tangga yang memiliki akses air limbah dibagi jumlah rumah tangga) x 100%	98,22%	kualitas permukiman	2. Persentase rumah tangga dengan layanan air limbah yang aman	(Jumlah rumah tangga yang terlayani IPAL dibagi jumlah rumah tangga) x 100%	98,22%
		3. Persentase Pelayanan Drainase Perkotaan	(Jumlah kawasan yang terlayani saluran drainase perkotaan dibagi jumlah kawasan yang harus terlayani saluran drainase) x 100%	91,93%		3. Persentase kawasan dengan layanan drainase perkotaan	(Jumlah kawasan yang terlayani saluran drainase perkotaan dibagi jumlah kawasan yang harus terlayani saluran drainase) x 100%	91,93%

Tabel 4.1.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Rumus Perhitungan	Target Akhir	Sasaran	Indikator Sasaran	Rumus Perhitungan	Target				
								2017	2018	2019	2020	2021
1	Meningkatnya kinerja pelayanan infrastruktur perkotaan	Persentase infrastruktur dalam kondisi baik	Rata-rata penjumlahan persentase jalan dalam kondisi baik, jalan dengan bahu jalan, jalan dengan trotoar dan jalan dengan pelengkap jalan dalam kondisi baik	73,37	1. Meningkatkan a kualitas pemanfaatan ruang sesuai perencanaan tata ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	Rata-rata penjumlahan persentase kesesuaian setiap kawasan pada kawasan lindung dan kawasan budidaya	91,59	92,47	93,36	93,96	94,57
					2. Meningkatkan a kualitas infrastruktur jalan	Persentase jalan dalam kondisi mantap dan keselamatan	Rata-rata penjumlahan persentase jalan dalam kondisi baik, jalan dengan bahu jalan, jalan dengan trotoar dan jalan dengan pelengkap jalan dalam kondisi baik	74,0	74,5	75	75,5	76
					3. Meningkatkan a kualitas infrastruktur jaringan irigasi	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	(Panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik dibagi panjang total jaringan irigasi) x 100%	92	93	94	95	96
					4. Meningkatkan a kualitas sarana prasarana keciptakarya an	1 Persentase bangunan gedung pemerintah yang sesuai standart	(Jumlah bangunan gedung pemerintah yang sesuai standart dibagi jumlah total bangunan gedung pemerintah) x 100%	-	60	65	70	75
						2 Persentase rumah tangga yang memiliki akses air bersih	(Jumlah rumah tangga yang memiliki akses air bersih dibagi jumlah rumah tangga) x 100%	87,39	93,69	100	100	100

						3	Persentase rumah tangga yang memiliki akses air limbah	(Jumlah rumah tangga yang memiliki akses air limbah dibagi jumlah rumah tangga) x 100%	98,10	99,5	100	100	100
						4	Persentase saluran drainase dalam kondisi baik	(Panjang saluran drainase dalam kondisi baik dibagi panjang total saluran drainase) x 100%	-	94	95	96	97

4.2 STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi merupakan langkah – langkah berisikan program – program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Agar misi dapat terwujud harus ada keselarasan antara tujuan dan strategi. Dengan demikian, strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan kedalam kebijakan – kebijakan dan program.

Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan tujuan dan sasaran satuan kerja perangkat daerah. Gambaran mengenai Strategi dan Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel 4.2. berikut :

Tabel 4.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	Meningkatnya kinerja pelayanan infrastruktur perkotaan	1. Meningkatkan kualitas pemanfaatan ruang sesuai perencanaan tata ruang	Meningkatkan pengelolaan tata ruang dan lingkungan hidup secara terpadu	Melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang
		2. Meningkatkan kualitas infrastruktur jalan	Meningkatkan kualitas infrastruktur jalan	Meningkatkan kualitas terhadap kondisi yang ada serta melengkapi jaringan jalan dan jembatan yang ada dengan pembangunan baru
				Melaksanakan peningkatan dan pemeliharaan jalan secara rutin dan berkala
		3. Meningkatkan kualitas infrastruktur jaringan irigasi	Meningkatkan kualitas infrastruktur jaringan irigasi	Melaksanakan peningkatan dan pemeliharaan jaringan irigasi secara rutin dan berkala
		4. Meningkatkan kualitas sarana prasarana keciptakaryaan	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana keciptakaryaan	Melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan gedung pemerintah
				Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana air bersih
				Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana air limbah
				Melaksanakan peningkatan dan pemeliharaan saluran drainase secara rutin dan berkala

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Dalam kurun waktu lima tahun kedepan (Tahun 2016 – 2021) program-program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar memprioritaskan program unggulan dan program lanjutan guna menyelesaikan kegiatan yang bersifat menerus.

Adapun pelaksanaan program dan kegiatan didasarkan pada kebijakan yang telah ditetapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar sebagai penjabaran dari kebijakan Pemerintah Kota Blitar. Dalam upaya mewujudkan program dan pelaksanaan kegiatan sesuai rencana Tahun 2016 – 2021 akan direalisasikan secara bertahap dan dengan pendekatan prioritas kegiatan dengan prinsip pelayanan kepada masyarakat dan berbasis pada penataan ruang kota. Untuk mendukung dalam merealisasi program dan kegiatan dibutuhkan dana dengan mengusulkan melalui dana yang bersumber dari APBD / DAU, APBD Propinsi Jawa Timur dan APBN. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar merupakan kegiatan sesuai dengan tupoksi Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang kota Blitar lintas SKPD bahkan direncanakan lintas wilayah, sedangkan penjabarannya dapat dijelaskan sebagaimana tertuang dalam Matriks Program Lima Tahunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar (Tabel 5.1)

Tabel 5.1.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN KOTA BLITAR TAHUN 2016

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN		UNIT KERJA PENANGGUNGJAWAB	LOKASI
									2016			
									TARGET	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Meningkatkan kualitas penataan ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	Meningkatnya pemanfaatan ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kota	Tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang dengan dokumen rencana pemanfaatan ruang	1.03.01.15	Program Perencanaan Tata Ruang	Prosentase ketersediaan dokumen dan informasi tata ruang dalam peta analog dan digital di kota dan kecamatan	%	60	75	472.590.000	Dinas PU dan Penataan Ruang	Kota Blitar
				1.03.01.15.07	Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan	Jumlah dokumen RTBL yang tersusun	dokumen		1	472.590.000		
				1.03.01.15.16	Pembuatan Sistem Informasi Tata Ruang	Jumlah sistem informasi tata ruang yang terupdate	sistem	1	1	-		
				1.03.01.17	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Prosentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap dokumen rencana tata ruang	%	97,7	97,75	108.085.800		
				1.03.01.17.08	Monitoring evaluasi dan pelaporan	Jumlah lokasi bangunan ber-IMB yang dimonitor	lokasi	6160	500	108.085.800		
				1.03.01.16	Program Pemanfaatan Ruang	Prosentase bangunan ber-IMB	%	68,75	74,3	504.793.000		
				1.03.01.16.05	Survey dan Pemetaan	Jumlah updating data sistem informasi database pemanfaatan ruang	database		1	390.000.000		

				1.03.01.16.07	Sosialisasi kebijakan, norma standar, procedur dan manual pemanfaatan ruang	Jumlah sosialisasi NSPM	kali		3	114.793.000		
Meningkatkan kinerja pelayanan infrastruktur perkotaan	Persentase jalan dalam kondisi mantap dan berkeselamatan	Meningkatnya kualitas jalan dan jaringan irigasi yang sesuai standar	Persentase jalan yang memenuhi kriteria mantap	1.03.01.18	Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Prosentase jalan dalam kondisi mantap dan berselamatan	%	73,37	73,5	68.173.761.033		
				1.03.01.18.03	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan	Panjang jalan yang direhabilitasi	m		1580	4.126.156.100		
						Panjang jalan yang dilakukan pemeliharaan rutin	m		5000			
						Panjang trotoar yang dilakukan pemeliharaan rutin	m		1000			
			Persentase jembatan dalam kondisi baik	1.03.01.18.06	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (DAK)	Panjang jalan yang dilakukan peningkatan			4750	20.606.095.100		
						Jumlah jembatan yang dilakukan peningkatan			1	10.000.000.000		
				1.03.01.18.07	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (DAK Tambahan)	Panjang Jalan yang dilakukan peningktan	M		37710	28.231.318.500		
				1.03.01.18.12	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Banprop)	Panjang jalan yang dilakukan peningkatan			2700	5.210.191.333		
				1.03.01.19	Program Peningkatan Sarana dana Prasarana Kebinamargaan	Prosentase sarana dan prasarana kebinamargaan dalam kondisi baik	%	60	60	35.000.000		
				1.03.01.19.10	Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat	Jumlah paket pemeliharaan alat-alat berat	paket		4	35.000.000		
			Persentase drainase dalam kondisi baik	1.03.01.17	Program Pembangunan Turap / Talud / Bronjong	Prosentase turap/talud/bronjong terbangun	%	60	60	6.877.790.200		
				1.03.01.17.03	Pembangunan Turap / Talud / Bronjong	Panjang talud yang terbangun	m		2500	6.877.790.200		

				1.03.01.20	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Prosentase jaringan pengairan dalam kondisi baik	%	95,09	95,1	18.328.371.400		
				1.03.01.20.10	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	Panjang jaringan irigasi yang dilakukan pemeliharaan rutin	m		500	456.331.300		
				1.03.01.20.18	Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK)	Panjang jaringan irigasi yang dilakukan peningkatan	m		16400	14.993.511.200		
				1.03.01.20.23	Rehabilitasi Drainase Perkotaan	Panjang drainase perkotaan yang direhabilitasi	m		560	2.525.138.900		
				1.03.01.20.24	Pemeliharaan Saluran Drainase	Panjang saluran drainase lingkungan yang dilakukan pemeliharaan rutin	m		300	353.390.000		
				1.03.01.23	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kota	Prosentase sarana dan prasarana kota terbangun	%	40	50	11.017.629.150		
				1.03.01.23.06	Pembangunan sarana / prasarana fasilitas umum	Jumlah fasilitas umum yang terbangun	unit		3	2.481.819.200		
				1.03.01.23.09	Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung Pemerintah	Jumlah gedung pemerintah yang terbangun	unit		2	7.459.333.500		
				1.03.01.23.19	Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kota	Jumlah dokumen perencanaan / rehabilitasi sarana dan prasarana kota	kegiatan		4	482.442.700		
				1.03.01.23.01	Pra Desain Rehabilitasi / Pemeliharaan dan Pembangunan Sarana Prasarana Kota	Jumlah pra desain sarana prasarana kota yang dihasilkan	dokumen		5	301.451.650		
				1.03.01.23.03	Verifikasi Hasil Perencanaan Teknis Pembangunan Fisik	Jumlah DED perencanaan pembangunan infrastruktur yang diverifikasi	DED		100	59.920.500		

				1.03.01.23.05	Pembinaan Teknis Pelaksanaan Fisik Rehabilitasi/Pemeliharaan Infrastruktur	Jumlah pembinaan teknis dan workshop yang dilakukan	kali		3	213.689.500		
				1.03.01.23.18	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan sarana prasarana kota	Jumlah bangunan fisik yang dimonitoring	paket		100	18.972.100		
				1.03.01.24	Program Standarisasi Bidang Pekerjaan Umum	Prosentase bangunan pemerintah sesuai standarisasi bidang pekerjaan umum	%	50	50	351.373.300		
				1.03.01.24.01	Penyusunan standart harga barang dan jasa konstruksi (SNI)	Jumlah buku standart harga barang dan upah kerja serta analisa harga satuan pekerjaan	buku		4	57.605.200		
				1.03.01.24.03	Fasilitasi jasa konstruksi dan konsultansi	Jumlah sosialisasi peraturan jasa konstruksi dan pelatihan keahlian tenaga teknik	kali		2	157.591.500		
						Jumlah buletin konstruksi yang diterbitkan	eksemplar		1000			
						Prosentase ketersediaan data bidang ke-PU an	%	66,67	70			
				1.03.01.24.04	Pengelolaan Data Elektronik Bidang ke-PU an	Jumlah inventarisasi dan Update Data sarana prasarana infrastruktur	databas e		3	136.176.600		
Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan air minum dan sanitasi	Persentase Tingkat Pelayanan Air Bersih	Meningkatnya Sarana dan Prasarana yang memadai guna meningkatkan kualitas permukiman	Prosentase KK yang mendapat layanan air bersih yang layak	1.03.01.21	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Prosentase masyarakat yang terlayani air bersih	%	25,39	30	4.628.084.361		
				1.03.01.21.06	Pembangunan jaringan air bersih / air minum	Jumlah sambungan rumah yang terbangun	SR		200	2.697.224.361		
						Jumlah SPAM yang terbangun	spam		2			
						Prosentase masyarakat yang terlayani air limbah	%	97,8	98			
	Persentase Tingkat Pelayanan		Prosentase rumah tangga dengan layanan air limbah	1.03.01.21.11	Pembangunan Sarana Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat	Jumlah prasarana IPAL yang terbangun	unit		5	1.833.100.000		

	Air Limbah		yang aman	1.03.01.21.12	Fasilitasi pengelolaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan	Frekuensi pelaksanaan koordinasi dan sosialisasi sanitasi perkotaan	kali		5	97.760.000		
Persentase Pelayanan Drainase Perkotaan	Prosentase pelayanan drainase perkotaan		1.03.01.16	Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong	Prosentase saluran drainase / gorong-gorong terbangun	%	60	60	8.229.538.000			
			1.03.01.16.03	Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong	Panjang saluran drainase/gorong-gorong terbangun	m		1750	8.229.538.000			
				1.03.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi perkantoran	%		100	511.176.150		
				1.03.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang terbayar	rekening		5	93.600.000		
				1.03.01.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara dan memperoleh izin/pajak tahunan yang terbayarkan	unit		20	8.760.000		
				1.03.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang terpenuhi	paket		72	35.000.000		
				1.03.01.01.11	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi	paket		9	32.795.750		
				1.03.01.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terpenuhi	paket		20	17.971.500		
				1.03.01.01.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang tersedia	paket		38	17.207.000		
				1.03.01.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia dalam satu tahun	eksemplar		4	7.560.000		

	1.03.01.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah paket makan minum yang tersedia	paket		12	22.512.000		
	1.03.01.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar daerah	Jumlah rapat - rapat koordinasi dan konsultasi regional dan nasional yang diikuti	DL		34	275.769.900		
	1.03.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam kondisi baik	%		80	846.850.000		
	1.03.01.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang terpenuhi	jenis		5	47.780.000		
	1.03.01.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang terpenuhi	unit		10	197.476.000		
	1.03.01.02.10	Pengadaan Meubelair	Jumlah jenis meubelair yang terpenuhi				58.825.000		
	1.03.01.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	unit		2	348.395.000		
			Jumlah paket pemeliharaan taman	paket		1			
	1.03.01.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terawat (penggantian suku cadang) dan mendapatkan BBM secara teratur	unit		6	161.174.000		
	1.03.01.02.26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah jenis perlengkapan kantor yang dipelihara secara rutin/berkala secara rutin/berkala	jenis		24	8.881.000		
	1.03.01.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Jenis Peralatan Kantor yang dipelihara	jenis		9	11.119.000		

	1.03.01.02.29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair	Jumlah jenis meubelair kantor yang terpelihara	jenis		4	13.200.000		
	1.03.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Satuan Kerja Perangkat Daerah	Persentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah	%		100	96.142.500		
	1.03.01.05.11	Fasilitasi keperansertaan pada even daerah dan hari besar nasional	Jumlah even daerah dan hari besar nasional yang diikuti	event		5	66.142.500		
	1.03.01.05.12	Penyebarluasan Informasi Program/Kegiatan SKPD	Jumlah penyebarluasan informasi program/kegiatan SKPD	kali		2	30.000.000		
	1.03.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun	%		100	22.307.000		
	1.03.01.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah jenis dokumen yang tersusun (LKjIP 2016, LPPD 2016, SPM 2016, SOP)	dokumen		4	10.290.000		
	1.03.01.06.05	Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran	Jumlah jenis dokumen yang tersusun (Renja, RKA, PRKA, DPA, DPPA)	dokumen		5	12.017.000		
JUMLAH							120.203.491.894		

Tabel 5.1.2
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BLITAR TAHUN 2017

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 2017		UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
									TARGET	Rp.		
Meningkatnya kinerja pelayanan infrastruktur perkotaan	Persentase infrastruktur dalam kondisi baik	Meningkatnya kualitas pemanfaatan ruang sesuai perencanaan tata ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	1.03.01.33	Program Perencanaan Tata Ruang	Prosentase ketersediaan dokumen dan informasi tata ruang	%	60	80	957.019.900	Dinas PU dan Penataan Ruang	Kota Blitar
				1.03.01.33.06	Penyusunan rencana tehnik ruang kawasan	Jumlah dokumen RTRK kawasan yang tersusun	dokumen		2	368.971.000		
				1.03.01.33.16	Pembuatan Sistem Informasi Tata Ruang	Jumlah sistem informasi tata ruang yang terupdate	sistem	1	1	247.613.900		
				1.03.01.33.17	Pengembangan Data Teknis Tata Ruang	Jumlah dokumen teknis tata ruang	dokumen	0	2	230.227.000		
				1.03.01.33.13	Survey dan Pemetaan	Jumlah updating data sistem informasi database pemanfaatan ruang	database		1	110.208.000		
				1.03.01.35	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase bangunan yang dapat diberikan rekomendasi IMB	%	97,7	97,75	88.990.500		
				1.03.01.35.08	Monitoring evaluasi dan pelaporan	Jumlah lokasi bangunan ber-IMB yang dimonitor	lokasi	6160	500	88.990.500		
				1.03.01.34	Program Pemanfaatan Ruang	Prosentase bangunan ber-IMB	%	68,75	74,3	103.606.000		
				1.03.01.34.07	Sosialisasi kebijakan, norma standar, procedur dan manual pemanfaatan ruang	Jumlah Sosialisasi tentang peraturan tata ruang	kali		3	103.606.000		

				1.03.01.15	Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Prosentase tanah aset bersertifikat	%		92	329.412.900		
				1.03.01.15.01	Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Jumlah tanah aset yang bersertifikat	bidang		543	294.733.050		
				1.03.01.15.06	Fasilitasi Penyelesaian Konflik Pertanahan	Jumlah masalah pertanahan yang terselesaikan	bidang		35	34.679.850		
		Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan	Persentase jalan dalam kondisi mantap dan berkeselamatan	1.03.01.18	Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Prosentase jalan dalam kondisi baik	%		99,80	34.251.319.900		
				1.03.01.18.03	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan	Panjang jalan yang direhabilitasi	m		4000	5.398.474.300		
						Panjang jalan yang dilakukan pemeliharaan rutin	m		1000			
						Panjang trotoar yang dilakukan pemeliharaan rutin	m		1000			
				1.03.01.18.04	Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan	Jumlah Jembatan yang dilakukan pemeliharaan	unit		5	863.884.700		
						Jumlah jembatan yang dilakukan peningkatan	unit		1			
				1.03.01.18.06	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (DAK)	Panjang jalan yang dilakukan peningkatan	m		5000	17.988.960.900		
				1.03.01.18.07	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Banprop)	Panjang sarana dan prasarana jalan yang dilakukan pemeliharaan/rehabilitasi	m		2500	10.000.000.000		
				1.03.01.19	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	Prosentase sarana dan prasarana kebinamargaan dalam kondisi baik	%	60	65	35.680.000		
				1.03.01.19.10	Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat	Jumlah alat-alat berat yang dipelihara	unit		4	35.680.000		

	Meningkatnya kualitas infrastruktur jaringan irigasi	Prosentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	1.03.01.17	Program Pembangunan Turap / Talud / Bronjong	Prosentase turap/talud/bronjong terbangun	%	60	65	3.092.342.100		
			1.03.01.17.03	Pembangunan Turap / Talud / Bronjong	Panjang talud yang terbangun	m		4800	3.092.342.100		
			1.03.01.17	Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Talud/Bronjong	Prosentase talud dalam kondisi baik	%	60	60			
			1.03.01.17	Rehabilitasi / Pemeliharaan Talud/Bronjong	Panjang Talud yang direhabilitasi	m					
			1.03.01.20	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Persentase luas layanan jaringan pengairan	%	-	76,40	12.910.158.600		
			1.03.01.20.10	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	Panjang jaringan irigasi yang dilakukan pemeliharaan rutin	m		1000	585.503.100		
			1.03.01.20.18	Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK)	Panjang jaringan irigasi yang dilakukan peningkatan	m		3697	4.241.714.200		
			1.03.01.20.23	Rehabilitasi Drainase Perkotaan	Panjang drainase perkotaan yang direhabilitasi	m		9000	8.082.941.300		
	Meningkatnya kualitas sarana prasarana keciptakaryaan	Persentase bangunan gedung pemerintah yang sesuai standart	1.03.01.23	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kota	Prosentase sarana dan prasarana kota terbangun	%	40	55	19.648.569.000		
			1.03.01.23.06	Pembangunan sarana / prasarana fasilitas umum	Jumlah fasilitas umum yang terbangun	unit		4	5.820.178.300		
			1.03.01.23.07	Pembangunan Pagar Pengaman Sarana Prasarana Kota	Jumlah bangunan gapuro yang terbangun	unit		2	442.505.100		
			1.03.01.23.09	Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung Pemerintah	Jumlah gedung pemerintah yang terbangun	unit		4	12.489.036.900		

				1.03.01.23.10	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Pemerintah	Jumlah sarana prasarana gedung pemerintah yang direhabilitasi	unit		3	681.431.000		
				1.03.01.23.04	Pembinaan Teknis Pelaksanaan Fisik Rehabilitasi/Pemeliharaan Infrastruktur	Jumlah pembinaan teknis dan workshop yang dilakukan	kali		4	215.417.700		
				1.03.01.24	Program Standarisasi Bidang Pekerjaan Umum	Persentase dokumen perencanaan teknis bidang pekerjaan umum yang sesuai standar	%	-	33,33	587.538.800		
				1.03.01.24.01	Penyusunan standart harga barang dan jasa konstruksi (SNI)	Jumlah buku standart harga barang dan upah kerja serta analisa harga satuan pekerjaan	buku		5	70.000.000		
				1.03.01.24.03	Fasilitasi jasa konstruksi dan konsultansi	Coffeemorning stakeholder jasa konstruksi Kota Blitar	kali		3	177.355.600		
						Jumlah buletin konstruksi yang diterbitkan	eksemplar		1500			
				1.03.01.24.05	Pra Desain Rehabilitasi / Pemeliharaan dan Pembangunan Sarana Prasarana Kota	Jumlah Buku Panduan Standart Perawatan dan Pemeliharaan BGN	buku		5	121.581.600		
				1.03.01.24.06	Verifikasi Hasil Perencanaan Teknis Pembangunan Fisik	Jumlah DED perencanaan pembangunan infrastruktur yang diverifikasi	DED		100	60.500.000		
						Persentase ketersediaan data bidang ke-PU an	%	66,67	80			
				1.03.01.24.04	Pengelolaan Data Elektronik	Jumlah inventarisasi dan Update Data sarana prasarana infrastruktur	database		3	158.101.600		
			2. Persentase rumah tangga yang memiliki akses air bersih	1.03.01.21	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Persentase jaringan air minum yang terbangun	%	-	66,67	6.240.600.400		

				1.03.01.21.13	Pembangunan jaringan air bersih / air minum	Jumlah sambungan rumah yang terbangun	SR		3	3.900.748.600		
						Jumlah SPAM yang terbangun	spam		5			
						Prosentase jaringan air limbah yang terbangun	%	-	87,14			
			3. Persentase rumah tangga yang memiliki akses air limbah	1.03.01.21.11	Pembangunan Sarana Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat	Jumlah prasarana IPAL yang terbangun	unit		5	2.216.763.500		
				1.03.01.21.12	Fasilitasi pengelolaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan	Frekuensi pelaksanaan koordinasi dan sosialisasi sanitasi perkotaan	kali		20	123.088.300		
			4. Prosentase saluran drainase dalam kondisi baik	1.03.01.16	Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong	Prosentase saluran drainase / gorong-gorong terbangun	%	60	65	304.000.000		
				1.03.01.16.05	Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Panjang saluran drainase yang dilakukan pemeliharaan rutin	m		1000	304.000.000		
				1.03.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi perkantoran	%		100	373.729.400		
				1.03.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang terbayar	rekening		5	103.200.000		
				1.03.01.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara dan memperoleh izin/pajak tahunan yang terbayarkan	unit		20	8.760.000		
				1.03.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang terpenuhi	paket		72	34.943.500		

				1.03.01.01.11	Penyediaan Barang Cetakan Dan Pengandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan pengandaan yang terpenuhi	paket		9	22.992.400		
				1.03.01.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terpenuhi	paket		20	9.879.200		
				1.03.01.01.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang tersedia	paket		38	11.296.900		
				1.03.01.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia dalam satu tahun	eksemplar		4	7.740.000		
				1.03.01.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah paket makan minum yang tersedia	paket		12	19.129.600		
				1.03.01.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar daerah	Jumlah rapat - rapat koordinasi dan konsultasi regional dan nasional yang diikuti	DL		34	155.787.800		
				1.03.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam kondisi baik	%		80	518.296.800		
				1.03.01.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang terpenuhi	jenis		5	63.764.000		
				1.03.01.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang terpenuhi	unit		10	129.111.500		
				1.03.01.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	unit		2	169.190.000		
						Jumlah paket pemeliharaan taman	paket		1			

				1.03.01.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terawat (penggantian suku cadang) dan mendapatkan BBM secara teratur	unit		6	120.936.600		
				1.03.01.02.26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah jenis perlengkapan kantor yang dipelihara secara rutin/berkala	jenis		24	8.833.000		
				1.03.01.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Jenis Peralatan Kantor yang dipelihara	jenis		9	15.561.700		
				1.03.01.02.29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair	Jumlah jenis meubelair kantor yang terpelihara	jenis		4	10.900.000		
				1.03.01.07	Program Peningkatan Kapasitas Satuan Kerja Perangkat Daerah	Persentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah	%		100	60.000.000		
				1.03.01.07.11	Fasilitasi keperansertaan pada even daerah dan hari besar nasional	Jumlah even daerah dan hari besar nasional yang diikuti	event		5	50.000.000		
				1.03.01.07.12	Penyebarluasan Informasi Program/Kegiatan SKPD	Jumlah penyebarluasan informasi program/kegiatan SKPD	kali		2	10.000.000		
				1.03.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun	%		100	20.000.000		
				1.03.01.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah jenis dokumen yang tersusun (LKjIP 2016, LPPD 2016, SPM 2016, SOP)	dokumen		4	10.000.000		
				1.03.01.06.05	Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran	Jumlah jenis dokumen yang tersusun (Renja, RKA, PRKA, DPA, DPPA)	dokumen		5	10.000.000		
JUMLAH										79.521.264.300		

Tabel 5.1.3
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BLITAR TAHUN 2018-2021

Tujuan		Sasaran		Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Sat.	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi pada Akhir Periode Renstra (2021)	Unit Kerja SKPD Penanggungjawab
Uraian	Indikator	Uraian	Indikator				2018		2019		2020		2021			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Meningkatnya kinerja pelayanan infrastruktur perkotaan	Persentase infrastruktur dalam kondisi baik	Meningkatnya kualitas pemanfaatan ruang sesuai perencanaan tata ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	Program Penataan Ruang	Persentase ketersediaan dokumen dan informasi tata ruang	%	85	1.149.616.400	90	1.174.897.445,33	100	1.181.003.955,90	100	1.231.267.806,58	100	Dinas PU dan Penataan Ruang
				Survey dan Pemetaan	Jumlah dokumen survey dan pemetaan yang tersusun	dokumen	1	50.000.000	1	50.000.000	1	51.106.511	1	61.267.807	4	
				Pengembangan Data Teknis Tata Ruang	Jumlah dokumen teknis tata ruang	dokumen	1	100.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	4	
				Penyusunan Rencana Tata Ruang	Jumlah dokumen RTRK kawasan yang tersusun	dokumen	2	300.000.000	2	379897445	1	379897445	2	400000000	7	

					Jumlah dokumen RTBL yang tersusun	dokumen	1	150.000.000	1	175.000.000	1	175.000.000	1	175.000.000	4	
					Jumlah dokumen tata ruang yang tersusun	dokumen	1	150.000.000	1	175.000.000	1	175.000.000	1	175.000.000	4	
				Pembuatan Sistem Informasi Tata Ruang	Jumlah sistem informasi tata ruang yang terupdate	sistem	1	209.000.000	0				0		1	
				Sosialisasi kebijakan, norma standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang	Jumlah sosialisasi NSPM	kali	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	12	
				Monitoring evaluasi dan pelaporan penataan ruang	Jumlah survey perijinan tata ruang	loka si	450	90.616.400	450	95.000.000	450	100.000.000	450	110.000.000	1800	
				Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Persentase tanah aset bersertifikat	%	97	329.412.900,00	98	336.656.970,68	99	338.406.739,87	100	352.809.423,08	100	

					Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (DAK)	Panjang jalan yang dilakukan peningkatan kapasitasnya	m	5000	16.481.319.900	5000	16.481.319.900	5000	16.481.319.900	5000	16.481.319.900	6200			
					Jumlah jembatan yang dilakukan peningkatan	unit								3					
					Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Banprop)	Panjang jalan yang dilakukan peningkatan	m		10.000.000.000		10.000.000.000		10.000.000.000		10.000.000.000				
						Panjang utilitas jalan yang dilakukan rehabilitasi	m	5000		5000		5000							
						Jumlah jembatan yang dilakukan peningkatan	unit												
					Rehabilitasi/pemelihar aan alat-alat berat	Jumlah alat-alat berat yang dipelihara	unit	4	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	24			
					Meningkatnya kualitas infrastruktur jaringan irigasi	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi dan Jaringan Pengairan Lainnya	Persentase luas layanan jaringan pengairan	%	85	16.306.500.700,00	90	16.665.094.560,88	95	16.751.711.121,74	100	17.464.668.518,95	100	
							Pembangunan Jaringan Irigasi dan Jaringan Pengairan Lainnya	Panjang jaringan pengairan/irigasi yang dibangun	m	5000	5.500.000.000	5000	5.500.000.000	5000	5.500.000.000	5000	6.114.668.519	2600	

			Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	Panjang turap/talud/bronjong yang dibangun	m	5000	5.369.097.800	5000	5.315.094.561	5000	5.401.711.122	5000	5.500.000.000	9000	
			Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi dan jaringan pengairan lainnya	Panjang jaringan irigasi yang dilakukan pemeliharaan rutin	m	2000	500.000.000	2000	600.000.000	2000	600.000.000	2000	600.000.000	5200	
			Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK)	Panjang jaringan irigasi yang dilakukan peningkatan	m	3000	4.241.714.200	3000	4.500.000.000	3000	4.500.000.000	3000	4.500.000.000	29297	
			Rehabilitasi / Pemeliharaan Turap/Talud/Bronjong	Panjang turap/talud/bronjong yang dilakukan rehabilitasi/pemeliharaan	m	750	695.688.700	750	750.000.000	750	750.000.000	750	750.000.000	3000	
			Meningkatnya kualitas sarana prasarana keciptakaryaan	1. Persentase bangunan gedung pemerintah yang sesuai standart	Program Standarisasi Bidang Pekerjaan Umum	Persentase dokumen perencanaan teknis bidang pekerjaan umum yang sesuai standart	%	50	840.600.900	66,67	865.000.000	83,33	892.000.000	100	940.000.000

	Persentase ketersediaan data bidang ke-PU an	%	60		80		100		100		100	
Pengelolaan Data Elektronik Bidang Pekerjaan Umum	Jumlah inventarisasi dan Update Data sarana prasarana infrastruktur	data base	2	158.101.600	2	160.000.000	2	165.000.000	2	170.000.000	18	
Penyusunan standart harga barang dan jasa konstruksi (SNI)	Jumlah buku standart harga barang dan upah kerja serta analisa harga satuan pekerjaan	buku	4	70.000.000	4	75.000.000	4	80.000.000	4	85.000.000	26	
Fasilitasi jasa konstruksi dan konsultansi	Jumlah sosialisasi peraturan jasa konstruksi dan pelatihan keahlian tenaga teknik	kali	2	215.417.700	2	220.000.000	2	225.000.000	2	250.000.000	16	
	Jumlah buletin konstruksi yang diterbitkan	eksemplar	1500		1500		1500		1500		3551	
Pra Desain Rehabilitasi / Pemeliharaan dan Pembangunan Sarana Prasarana Kota	Jumlah pra desain sarana prasarana kota yang dihasilkan	dokumen	1	121.581.600	1	125.000.000	1	130.000.000	1	135.000.000		
	Jumlah Sosialisasi Buku Panduan Standart ke-PU an		2		2		2		2			
Verifikasi Hasil Perencanaan Teknis Pembangunan Fisik	Jumlah DED perencanaan pembangunan infrastruktur yang diverifikasi	DED	100	60.500.000	100	65.000.000	100	67.000.000	100	70.000.000	700	

			Pembinaan Teknis Pelaksanaan Fisik Rehabilitasi/Pemeliharaan Infrastruktur	Jumlah pembinaan teknis dan pelatihan yang dilakukan	kali	4	215.000.000	4	220.000.000	4	225.000.000	4	230.000.000	21	
			Program Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Keciptakarya	Persentase gedung pemerintah yang dibangun dan dipelihara	%	33,33	23.406.937.900	50	23.915.762.863	66,67	24.017.560.479	83,33	25.049.718.171	100	
			Fasilitasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung, Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah fasilitasi penyelenggaraan bangunan gedung	kali	1	250.000.000	1	275.000.000	1	275.000.000	1	300.000.000	4	
			Pembangunan dan Rehabilitasi sarana / prasarana fasilitas umum	Jumlah fasilitas umum yang dibangun dan direhabilitasi	unit	5	5.800.000.000	5	5.900.000.000	5	5.950.000.000	5	6.000.000.000	15	
			Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Pemerintah	Jumlah gedung pemerintah yang dibangun dan direhabilitasi	unit	4	9.864.279.800	4	10.630.762.863	4	10.682.560.479	4	11.639.718.171	17	
		2. Persentase rumah tangga yang memiliki akses air bersih		Persentase jaringan air minum yang terbangun	%	83,33		100		100		100		100	
			Pembangunan jaringan air bersih / air minum	Jumlah sambungan rumah yang terbangun	SR	200	3.900.748.600	200	3.500.000.000	200	3.500.000.000	200	3.500.000.000	1200	

				Jumlah SPAM yang terbangun	spa m	2		2		2		2		12	
			3. Persentase rumah tangga yang memiliki akses air limbah		Persentase jaringan air limbah yang terbangun	%	94,28		100		100		100	100	
				Pembangunan Sarana Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat	Jumlah prasarana IPAL yang terbangun	unit	7	2.216.763.500	7	2.300.000.000	7	2.300.000.000	7	2.300.000.000	32
				Fasilitasi pengelolaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan	Frekuensi pelaksanaan koordinasi dan sosialisasi sanitasi perkotaan	kali	5	110.000.000	5	110.000.000	5	110.000.000	5	110.000.000	30
			4. Prosentase saluran drainase dalam kondisi baik		Persentase saluran drainase yang dipelihara	%	36,03		40,39		44,75		49,1	49,1	
				Pembangunan dan Rehabilitasi Saluran Drainase	Panjang saluran drainase lingkungan yang dibangun dan dilakukan pemeliharaan rutin	m	1000	1.265.146.000	1000	1.200.000.000	1000	1.200.000.000	1000	1.200.000.000	1200
				Program Pelayanan Perkantoran	Persentase kecukupan pelayanan perkantoran	%	100	927.706.200,00	100	948.107.250,73	100	953.035.022,91	100	993.596.453,59	400

				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang terbayar	rekening	5	103.200.000	5	110.000.000	5	116.535.023	5	120.000.000	20	
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah unit kendaraan dinas yang terbayarkan pajaknya	unit	21	8.760.000	21	10.000.000	21	10.000.000	21	11.000.000	84	
				Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia	jenis	72	34.943.500	72	36.000.000	72	36.000.000	72	37.000.000	288	
				Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	jenis	72	22.992.400	72	23.000.000	72	23.000.000	72	24.000.000	288	
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan yang tersedia	jenis	20	9.879.200	20	12.000.000	20	12.500.000	20	13.000.000	80	
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang tersedia	jenis	38	11.296.900	38	12.000.000	38	12.500.000	38	14.000.000	152	
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	jenis	4	7.740.000	4	8.000.000	4	8.500.000	4	10.000.000	16	

				Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah paket makan minum yang tersedia	paket	12	19.129.600	12	20.000.000	12	21.000.000	12	22.000.000	48	
				Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar daerah	Jumlah rapat - rapat koordinasi dan konsultasi regional dan nasional yang diikuti	DL	36	155.787.800	36	170.000.000	36	175.000.000	36	180.000.000	144	
				Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang terpenuhi	jenis	5	63.764.000	5	70.000.000	5	70.000.000	5	72.000.000	20	
				Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang terpenuhi	jenis	10	129.111.500	10	130.000.000	10	120.000.000	10	125.000.000	40	
				Pengadaan Meubelair	Jumlah jenis meubelair yang terpenuhi	jenis	3	35.680.000	3	34.107.251	3	35.000.000	3	36.000.000	12	
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	unit	1	169.190.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	155.000.000	4	
				Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara (penggantian suku cadang) dan mendapatkan BBM secara teratur	unit	5	120.936.600	5	125.000.000	5	125.000.000	5	132.596.454	20	

				Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah jenis perlengkapan kantor yang dipelihara	jenis	2	8.833.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	12.000.000	8	
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Jenis Peralatan Kantor yang dipelihara	jenis	9	15.561.700	9	16.000.000	9	16.000.000	9	17.000.000	36	
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair	Jumlah jenis meubelair kantor yang terpelihara	jenis	4	10.900.000	4	12.000.000	4	12.000.000	4	13.000.000	16	
				Program Peningkatan Kapasitas Perangkat Daerah	Tingkat Partisipasi aktif perangkat daerah dalam agenda Pemda Kota Blitar	%	100	60.000.000,00	100	61.319.451,18	100	61.638.158,04	100	64.261.494,87	400	
				Fasilitasi keperansertaan pada even daerah dan hari besar nasional	Jumlah even daerah dan hari besar nasional yang diikuti	event	4	50.000.000	4	51.319.451	4	51.638.158	4	54.261.495	16	
				Penyebarluasan informasi program / kegiatan SKPD	Jumlah penyebarluasan informasi program/kegiatan PD	kali	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	8	

				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan perangkat daerah yang tersusun tepat waktu dan sesuai dengan aturan	%	100	20.000.000,00	100	20.439.817,06	100	20.546.052,68	100	21.420.498,29	100	
					Nilai SKM		baik		baik		baik		baik		baik	
				Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah jenis dokumen yang tersusun (LKj IP , LPPD , SPM , SKM)	jenis	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	16	
				Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran	Jumlah jenis dokumen yang tersusun (Renja, RKA, PRKA, DPA, DPPA)	jenis	5	10.000.000	5	10.439.817	5	10.546.053	5	11.420.498	20	
JUMLAH								77.292.094.900		78.771.905.471		79.129.346.344		82.091.510.191		



Secara garis besar rencana program yang akan di laksanakan pada Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Perkantoran
2. Program Peningkatan Kapasitas Perangkat Daerah
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja dan Keuangan
4. Program Penataan Ruang
5. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah.
6. Program Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
7. Program Pembangunan dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan Jaringan Pengairan Lainnya.
8. Program Standarisasi Bidang Pekerjaan Umum.
9. Program Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Keciaptakaryaan

BAB VI

INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Keterkaitan RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar dengan RPJMD Kota Blitar Tahun 2016-2021 adalah pada :

Misi ketiga : Meningkatkan kemandirian ekonomi yang berorientasi pada industri pariwisata dan ekonomi kreatif yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan.

Tujuan keempat : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan penataan ruang.

Sasaran ke-15 :Meningkatnya kinerja pelayanan infrastruktur perkotaan

Indikator Sasaran dalam RPJMD tersebut kemudian menjadi Indikator Tujuan dalam RENSTRA sekaligus menjadi Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar Tahun 2016-2021. Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada RPJMD dapat dilihat pada Tabel 6.1 berikut :

Tabel 6.1
Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar
yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2016

INDIKATOR SASARAN RPJMD	INDIKATOR TUJUAN RENSTRA	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	
		2015	2016
Persentase infrastruktur dalam kondisi baik	Persentase infrastruktur dalam kondisi baik	78,22	79,43

Tabel 6.2
Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar
yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Tahun 2017-2021

INDIKATOR SASARAN RPJMD	INDIKATOR TUJUAN RENSTRA	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2016)	Target					Kondisi Kinerja pada Akhir Th. 2021
			2017	2018	2019	2020	2021	
Persentase infrastruktur dalam kondisi baik	Persentase infrastruktur dalam kondisi baik	79,43	79,6	79,8	80	80,2	80,4	80,4

Tabel 6.1.3
Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Tahun 2017 -2021

No.	KINERJA UTAMA/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET					PENANGGUNG JAWAB
				2017	2018	2019	2020	2021	
1	Meningkatnya kualitas pemanfaatan ruang sesuai perencanaan tata ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	Rata-rata penjumlahan persentase kesesuaian setiap kawasan pada kawasan lindung dan kawasan budidaya	91,59	92,47	93,36	93,96	94,57	Bidang Tata Ruang
2	Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan	Persentase jalan dalam kondisi mantap dan berkeselamatan	Rata-rata penjumlahan persentase jalan dalam kondisi baik, jalan dengan bahu jalan, jalan dengan trotoar dan jalan dengan pelengkap jalan dalam kondisi baik	74	74,5	75	75,5	76	Bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air
3	Meningkatnya kualitas infrastruktur jaringan irigasi	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	(Panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik dibagi panjang total jaringan irigasi) x 100%	92	93	94	95	96	Bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air
4	Meningkatnya kualitas sarana prasarana keciptakarya	Persentase bangunan gedung pemerintah yang sesuai standar (Standar : Permen PU Nomer 45/PRT/M/2007)	(Jumlah bangunan gedung pemerintah yang sesuai standart dibagi jumlah total bangunan gedung pemerintah) x 100%	55	60	65	70	75	Bidang Cipta Karya dan Bina Konstruksi
		Persentase rumah tangga yang memiliki akses air bersih	(Jumlah rumah tangga yang memiliki akses air bersih dibagi jumlah rumah tangga) x 100%	87,39	93,69	100	100	100	Bidang Cipta Karya dan Bina Konstruksi
		Persentase rumah tangga yang memiliki akses air limbah	(Jumlah rumah tangga yang memiliki akses air limbah dibagi jumlah rumah tangga) x 100%	99	99,5	100	100	100	Bidang Cipta Karya dan Bina Konstruksi
		Persentase saluran drainase dalam kondisi baik	(Panjang saluran drainase dalam kondisi baik dibagi panjang total saluran drainase) x 100%	93	94	95	96	97	Bidang Cipta Karya dan Bina Konstruksi

BAB VII

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar disusun sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan selama tahun 2016 – 2021 yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada RPJMD Daerah dan bersifat indikatif.

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar tahun 2016 – 2021 ditetapkan dengan Peraturan Walikota Blitar dan disahkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar. Rencana Strategis dimaksud merupakan pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan yaitu Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar. Selain itu, rencana strategis dimaksud juga merupakan dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar Tahun 2016 – 2021 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar dalam melaksanakan tugas – tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat.

Jika terjadi perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja maka akan dilakukan perubahan Renstra dengan berpedoman pada kewenangan sesuai dengan Peraturan Walikota yang mengatur tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja.

Blitar, 05 Juli 2017

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Blitar

Drs. HERMANSYAH PERMADI, M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 19660423 199203 1 007

